



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Instansi Pemerintah yang secara substantif merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah digariskan dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk analisa efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan tahun berjalan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 Perubahan, hal ini merupakan wujud dari keinginan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan dapat mencerminkan aparatur pemerintah yang *Clean Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki kearah yang lebih baik menuju kesempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purwokerto, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas

IRAWATI, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650126 199003 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai unsur pendukung tugas Bupati Banyumas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menyusun Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023 dengan menetapkan visi : ***“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil – Makmur, dan Mandiri “***

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja di atas tentu tidak terlepas dari dukungan dana, besaran anggaran yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut

I.	Anggaran Penunjang urusan Pemerintah Daerah	:	Rp 8.307.206.399
II.	Anggaran Urusan Penanaman Modal	:	Rp. 807.308.100
	Jumlah	:	Rp. 9.114.514.499

Dari jumlah Anggaran Rp 9.114.514.499 telah terealisasi sebesar Rp 8.711.971.704 (95,58%), dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar 402.522.795 (4,42%). Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 8.307.206.399 yang telah terpakai sampai dengan realisasi tanggal 31 Desember 2023 sebesar 8.055.872.504 (96,97%) dengan demikian terdapat sisa sebesar 251.333.895 (3,03%), sedangkan Jumlah Anggaran Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 807.318.100 yang telah terpakai sampai dengan realisasi tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 656.099.200 (81,27%) dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 151.218.900 (18,73%).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 2 (Dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2023 untuk sasaran pertama Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal pencapaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 98,12% dan sasaran kedua Meningkatnya Nilai Investasi Daerah pencapaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 300,51%. Untuk Presentase efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 106,57%, sehingga pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "**Sangat Tinggi**".

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	6
Daftar Grafik	7
Daftar Tabel	8
Daftar Lampiran	13
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP	17
C. Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Banyumas	18
C. Sistematika Penyusunan LAKjIP DPMPTSP	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis	23
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022	30
C. Rencana Anggaran per Sasaran Srategis Tahun 2022	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja	38
C. Akuntabilitas Keuangan	125
D. Prestasi dan Penghargaan.....	138
BAB IV PENUTUP	139
LAMPIRAN	142



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. : Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas 18



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. : Investasi per Sektor Tahun 2022	128
Grafik 2. : Penyerapan Tenaga Kerja di Kab. Banyumas Tahun 2022	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Banyumas Menurut Golongan Jenis Kelamin dan Pendidikan Bulan Desember 2022	19
Tabel 1.2	:	Pegawai DPMPTSP Kabupaten Banyumas menurut Eselon Bulan Desember 2022	20
Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2022	24
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2022	29
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022	30
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022	33
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.2	:	Capaian Kinerja Utama Pada DPMPTSP Tahun 2022	36
Tabel 3.3	:	Capaian Kinerja Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	37
Tabel 3.4	:	Capaian Kinerja Tujuan I (Satu) Tahun 2020 dan Tahun 2022	41
Tabel 3.5	:	Hasil Survey Masyarakat per Unsur Pelayanan	42
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Tujuan II (Dua) Tahun 2021 dan Tahun 2022	44
Tabel 3.7	:	Realisasi Investasi per Sektor	44
Tabel 3.8	:	Realisasi Investasi Kab. Banyumas	47
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran I	47
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran II	49
Tabel 3.11	:	Realisasi Proyek Tahun 2022	50
Tabel 3.12	:	Serapan Tenaga Kerja Tahun 2022	50
Tabel 3.13	:	Capaian Kinerja Sasaran III	51
Tabel 3.14	:	Capaian Kinerja Sasaran IV	52
Tabel 3.15	:	Capaian Kinerja Sasaran V	53
Tabel 3.16	:	Capaian Kinerja Program Tahun 2022	54
Tabel 3.17	:	Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal	60
Tabel 3.18	:	Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	61
Tabel 3.19	:	Capaian Kinerja Program Pelayanan Promosi Penanaman Modal	62

Tabel 3.20	: Capaian Kinerja Program Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62
Tabel 3.21	: Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	63
Tabel 3.22	: Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64
Tabel 3.23	: Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022	66
Tabel 3.24	: Capaian Kinerja Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	71
Tabel 3.25	: Capaian Kinerja Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	72
Tabel 3.26	: Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72
Tabel 3.27	: Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	73
Tabel 3.28	: Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	73
Tabel 3.29	: Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74
Tabel 3.30	: Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75
Tabel 3.31	: Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75
Tabel 3.32	: Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76

Tabel 3.33	: Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76
Tabel 3.34	: Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77
Tabel 3.35	: Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77
Tabel 3.36	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022	78
Tabel 3.37	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90
Tabel 3.38	: Jenis Pelayanan pada MPP Kab. Banyumas	91
Tabel 3.39	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	95
Tabel 3.40	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	97
Tabel 3.41	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97
Tabel 3.42	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98
Tabel 3.43	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99
Tabel 3.44	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99
Tabel 3.45	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100
Tabel 3.46	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100
Tabel 3.47	: Capaian Kinerja Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	101

Tabel 3.48 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102
Tabel 3.49 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	102
Tabel 3.50 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103
Tabel 3.51 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103
Tabel 3.52 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104
Tabel 3.53 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105
Tabel 3.54 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105
Tabel 3.55 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106
Tabel 3.56 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107
Tabel 3.57 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107
Tabel 3.58 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108
Tabel 3.59 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	109
Tabel 3.60 :	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	110

Tabel 3.61	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	110
Tabel 3.62	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	111
Tabel 3.63	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	112
Tabel 3.64	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	113
Tabel 3.65	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	113
Tabel 3.66	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	114
Tabel 3.67	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	115
Tabel 3.68	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	116
Tabel 3.69	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Realisasi Keuangan per Program Tahun 2022	119
Tabel 3.70	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Anggaran Yang Mendukung Sasaran	120
Tabel 3.71	: Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran DPMPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2022	123
Tabel 3.72	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	124
Tabel 3.73	: Jumlah Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan I-IV Tahun 2022	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Perangda Dpmptsp (Kepala Opd)	137
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Nama Jabatan Kabid Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra & Kabid Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan Pada Perangkat Daerah Dpmptsp	138
Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Nama Jabatan Kabid Pippm Pada Perangkat Daerah Dpmptsp	139
Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Nama Jabatan Kabid Daldatin Pada Perangkat Daerah Dpmptsp	141
Lampiran 5 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Nama Jabatan Sekretaris Pada Perangkat Daerah Dpmptsp	142
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan *good governance* itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyumas dirasakan semakin berat, karena dituntut untuk dapat menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif dan berdaya saing tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan melalui penyederhanaan birokrasi perijinan dan percepatan waktu penyelesaian yang memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa investasi (penanaman modal) sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Investasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan untuk menarik penanaman modal menanamkan modalnya di kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan sesuai dengan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Isu strategis kabupaten terkait penanaman modal :

1. Masih rendahnya jumlah investor yang menanamkan modal di Kab.Banyumas

Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah investasi tidak diikuti dengan penyerapan

tenaga kerja yang sebanding.

2. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pelayanan perizinan penanaman modal.
4. Masih terbatasnya inovasi pelayanan dan promosi penanaman modal.
5. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Masih terdapat pelanggaran peruntukan lokasi RTRW.
7. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
8. Belum adanya Kawasan Industri, sementara baru ada Peruntukan Kawasan Industri yaitu diwilayah Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Kemranjen
Terkait isu-isu tersebut diatas perlu perencanaan terhadap :
 1. Peningkatan iklim investasi melalui promosi dan kemudahan-kemudahan penanaman modal.
 2. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 3. Peningkatan inovasi dalam pelayanan penanaman modal.
 4. Mempercepat penyelesaian perda dan perbup tentang insentif penanaman modal.
 5. Pemberian insentif bagi investor padat karya.
 6. Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal
 7. Mendorong pada percepatan Perda RTRW, sehingga lokasi penanaman modal menjadi jelas termasuk untuk kawasan peruntukan industri.
 8. Mendorong segera direalisasikannya Kawasan industri, sehingga dapat meningkatkan investasi serta penyerapan tenaga kerja.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perijinan dan non perijinan sesuai peraturan perundang – undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Pendokumentasi penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PMPTSP KABUPATEN BANYUMAS

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

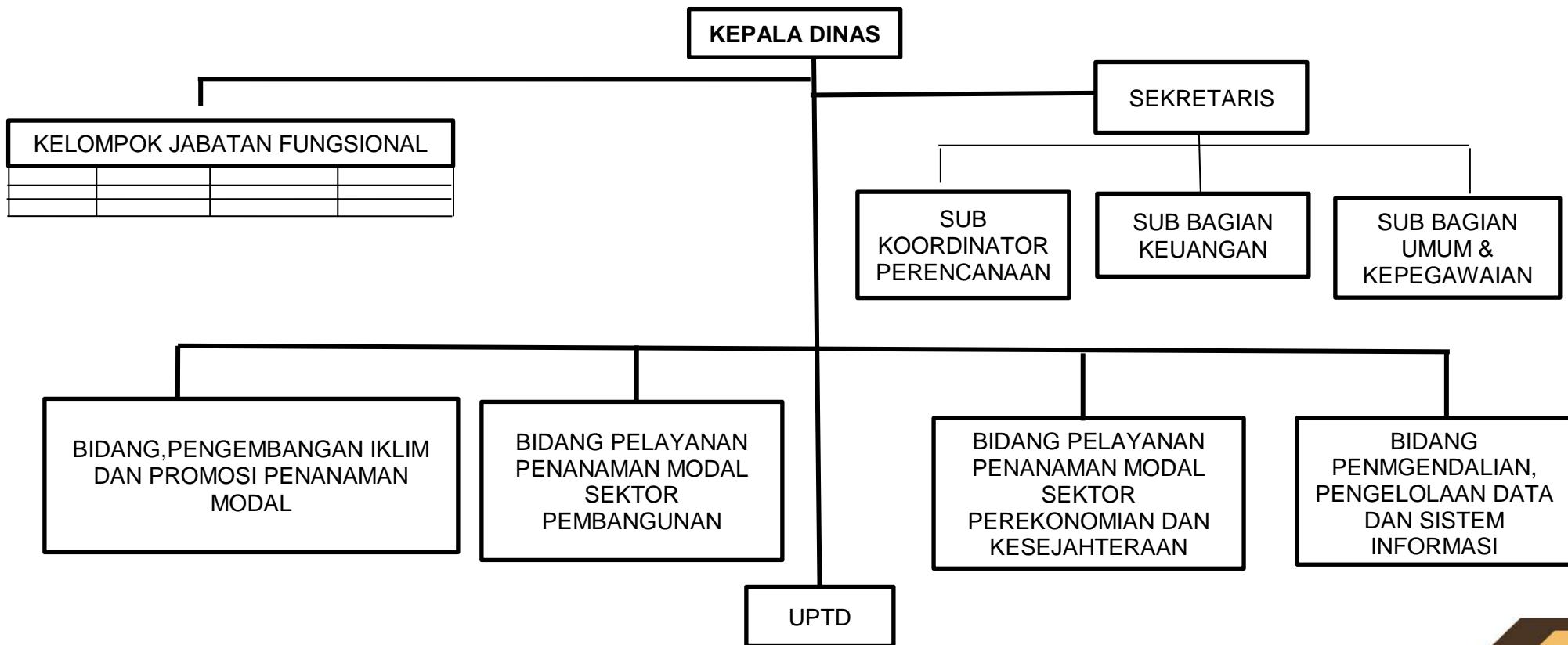
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekeretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- g. Jabatan Fungsional.

- a. Struktur Organisasi DPMPPPTSP Kabupaten Banyumas terdiri dari:

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas



Jumlah pegawai yang ada di DPMPTSP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2023 ada Pegawai DPMPTSP Kab.Banyumas menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan:

Tabel 1.1

Kondisi Pegawai DPMPTSP Kab.Banyumas
Menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan
Bulan Desember 2023

No .	Gol.	Jenis Kelamin			Pendidikan					
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	IV	2	2	4	0	0	0	0	2	2
2.	III	10	7	17	0	0	4	1	10	2
3.	II	1	4	5	0	1	2	2	0	0
4.	I	3	0	3	3	0	0	0	0	0
5.	IX	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	JML	16	14	30	3	1	6	3	13	4
5.	PTT	23	19	42	1	1	7	7	26	0
	JML	39	33	72	4	2	13	10	39	4
	TOTAL									

Jumlah pegawai yang ada di DPMPTSP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2023 ada Pegawai DPMPTSP Kab.Banyumas menurut Eselon :

Tabel 1.2
Pegawai DPMPPTSP Kab.Banyumas menurut Eselon
Bulan Desember 2023

IV B	IV A	III B	III A	II B	II A
0	2	4	1	1	0

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKJIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

C. Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Banyumas

C. Sistematika Penyusunan LAKJIP DPMPTSP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Anggaran per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Perubahan ditetapkan dengan Perbup No. 22 Tahun dimana Rencana Strategis tersebut berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 Perubahan dengan Visi “ *Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil – Makmur, dan Mandiri* ”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di jabarkan dalam Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah :

Misi DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah:

Misi I Kabupaten Banyumas

- Mewujudkan Banyumas sebagai barometer playanan publik

Misi V Kabupaten Banyumas

- Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang barbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Sasaran

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam :

- 2 (dua) tujuan
- 2 (dua) sasaran
- 3 (tiga) sasaran perubahan

yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik
			Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan
			Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang berulang

2.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah	Meningkatnya proyek investasi daerah	Pertumbuhan proyek investasi daerah
			Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	Persentase kegiatan usaha yang berizin

Ket: Kolom diarsir adalah Indikator baru sesuai arahan Kemenpan RB RI

3. Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi-Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas diarahkan pada peningkatan kemudahan berinvestasi. Untuk mewujudkan strategi yang sudah ditetapkan maka kebijakan yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada
2. Kebijakan untuk menarik investasi
3. Kebijakan untuk meningkatkan daya saing wilayah dan sektoral
4. Pelayanan public satu pintu dan pemanfaatan teknologi meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
5. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi

4. Program SKPD

Program tahun 2023 yang diproyeksikan dan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebanyak 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2). Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3). Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1). Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman ModalK
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1). Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 2). Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3.) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1).Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis tahunan yang mengacu dari RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 Perubahan, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2023. Indikator kinerja utama akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya. Sasaran strategis tahunan ,indikator kinerja dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90 %
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	600 Miliar Rupiah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sumber Data : Laporan Dokumen IKM – Bid. Daldatin	Nilai	90
2.	Menurunnya peraduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Formulasi : Jumlah aduan yang diselesaikan di bagi jumlah aduan yang masuk dikali 100 % Sumber data : Laporan Pengaduan Masyarakat - Bidang Daldatin	%	100
3.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Formulasi : Nilai investasi daerah Sumber data : Dokumen laporan realisasi investasi – Bidang Daldatin	Miliar Rupiah	600

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Proyek Investasi Daerah	Pertumbuhan proyek investasi daerah	Formulasi : Proyek Investasi Thn N - Proyek Investasi N-1 dibagi proyek investasi N-1 x 100 Sumber data : Perizinan berusaha dan LKPM – Bidang Daldatin	%	1
5.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan	Formulasi : Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan dibagi jumlah pengaduan (keluhan) dikali seratus persen Sumber data : Laporan Pengaduan Masyarakat - Bidang Daldatin	%	100
6.	Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang berulang	Formulasi : Jumlah aduan keluhan berulang dibagi jumlah aduan keluhan dikali seratus persen Sumber data : Lapak aduan, surat masuk, aduan langsung (formulir), media sosial)- Bidang Daldatin	%	0

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	Persentase kegiatan usaha yang berizin	<p>Formulasi : Jumlah kegiatan usaha yang berizin dibagi jumlah total kegiatan usaha dikali seratus persen</p> <p>Sumber data : Lapak aduan, surat masuk, aduan langsung (formulir), media sosial)- Bidang Pelayanan PM sector Perekonomian Kesra dan Bidang PM Sektor Pembangunan</p>	%	10

C. RENCANA ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2023

**Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	R p. 261.523.200
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Rp. 756.520.100
JJUMLAH		Rp 1.018.043.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Perubahan.

Sesuai dengan pedoman PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ini disajikan dalam uraian hasil pengukuran, analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan dari hasil pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2023 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja tersebut berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2023 yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala dan Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Peringkat Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Hingga akhir tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum hasil penilaian 2 (dua) tujuan 2 (dua) sasaran, 6 (enam) program, dan 12 (dua belas) Kegiatan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, menunjukkan bahwa diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sampai akhir bulan Desember adalah capaian kinerja tujuan 199,32% (2 indikator tujuan), capaian sasaran 984,2% (5 indikator sasaran), capaian kinerja program 99,10% (9 indikator program), capaian kinerja kegiatan 141,13 % (12 indikator kegiatan), capaian kinerja sub kegiatan 194,3 % (32 indikator kegiatan) dan Prosentase realisasi keuangan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 adalah 97,01 %, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "**Sangat tinggi**".

Adapun Capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja utama antara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA UTAMA PADA DPMPTSP
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90	87,33	98,12
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	600.000.000.000	1.637.794.413.773	300,51

B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Ket.		Satuan	Kondisi Awal	Kinerja RKPD Tahun 2022						Prosente se Kinerja RKPD s.d. 2022	Status Capaian 2022	Kondisi		Prosente se Kinerja RPJMD s.d. 2022	Status Capaian 2022 Triwulan IV	OPD.					
		Perhitungan	Capaian			Target 2022 (sesuai RPJMD)	Capaian 1	Capaian 2	Capaian 3	Capaian 4	Capaian 2022 s.d. Triwulan IV			Targe t	Kondisi Kinerja AKhir RPJMD	Capaian RKPD 2022 s.d. Triwulan IV							
C. Aspek Pelayanan Umum																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																							
1.	Pertumbuhan proyek investasi daerah	NON KUMULATIF	POSITIF	%	74.57	1	76,61	5,59	32,64	32,64	43,13	4.313		1	43,13	4.313		sasaran OPD DPMPTSP					

No	Indikator Kinerja Daerah	Ket.		Satuan	Kondisi Awal 2021	Kinerja RKPD Tahun 2022						Prosente se Kinerja RKPD s.d. 2022	Status Capaian 2022	Kondisi		Prosente se Kinerja RPJMD s.d. 2022	Status Capaian 2022 Triwulan IV	OPD.					
		Perhitungan	Capaian			Target 2022 (sesuai RPJMD)	Capaian 1	Capaian 2	Capaian 3	Capaian 4	Capaian 2022 s.d. Triwulan IV			Targe t Kondisi Kinerj a AKhir RPJM D	Capaian RKPD 2022 s.d. Triwulan IV								
2.	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	NON KUMULATIF	POSITIF	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	sasaran OPD DPMPTSP						
3.	Nilai investasi daerah	NON KUMULATIF	POSITIF	Milyar Rupiah	102,56	545	195,79	584,37	749,53	963,51	1.662,46	305,04	600	1.662,46	277,08	tujuan OPD DPMPTSP							
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non	NON KUMULATIF	POSITIF	nilai	92,75	89,00	87,53	91,25	89,93	87,33	87,33	98,12	90,00	87,33	97,03	tujuan OPD DPMPTSP							

No	Indikator Kinerja Daerah	Ket.		Satuan	Kondisi Awal	Kinerja RKPD Tahun 2022						Prosente se Kinerja RKPD s.d. 2022	Status Capaian 2022	Kondisi		Prosente se Kinerja RPJMD s.d. 2022	Status Capaian 2022	OPD.	
		Perhitungan	Capaian			Target 2022 (sesuai RPJMD)	Capaian 1	Capaian 2	Capaian 3	Capaian 4	Capaian 2022 s.d. Triwulan IV			Targe t Kondisi Kinerj a AKhir RPJMD	Capaian RKPD 2022 s.d. Triwulan IV	Kinerja Akhir			
	Perizinan																		
PK Perubahan																			
5.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	NON KUMULATIF	POSITIF	%	-	100	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	sasaran OPD DPMPTSP	
6.	Menurunnya pengaduan masyarakat yang	NON KUMULATIF	POSITIF	%	-	0	-	-	-	0	0	100	100	0	0	100	100	sasaran OPD DPMPTSP	

No	Indikator Kinerja Daerah	Ket.		Satuan	Kondisi Awal	Kinerja RKPD Tahun 2022						Prosente se Kinerja RKPD s.d. 2022	Status Capaian 2022	Kondisi		Prosente se Kinerja RPJMD s.d. 2022	Status Capaian 2022 Triwulan IV	OPD.
		Perhitungan	Capaian			Target 2022 (sesuai RPJMD)	Capaian 1	Capaian 2	Capaian 3	Capaian 4	Capaian 2022 s.d. Triwulan IV			Targe t	Kondisi Kinerj a AKhir RPJMD	Kinerja Akhir		
	berulang																	
7.	Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	KUMULATIF	POSITIF	%	-	10	-	-	-	30,81	30,81	308		20	30,81	154	sasaran OPD DPMPTSP	

a. Capaian Kinerja Tujuan

Perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja Per sasaran strategis dari tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4

CAPAIAN KINERJA TUJUAN I (SATU) DARI TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	A (88)	A(92,75)	105,39	A (89)	A (87,33)	A (98,12)

Penjelasan :

TUJUAN I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja

- Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Indeks Masyarakat tahun 2022 target Nilai A Nilai interval (89), realisasi Nilai A dengan Nilai 87,33.

Hasil IKM ini mengalami penurunan dari tahun 2021, sehingga hal ini harus dilakukan evaluasi terhadap layanan public di MPP.

Rincian nilai Jan – Desember 2022 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.5
Hasil Survey Masyarakat per Unsur Pelayanan
(Jumlah sampel responden penerima layanan yang diperoleh Bulan
Januari-Desember yaitu 3064 orang responden)

NO	Unsur Pelayanan	NRR **	KET
U1	Persyaratan	86,02	Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	84,97	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	83,81	Baik
U4	Biaya/Tarif	94,85	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	84,83	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	85,77	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	85,68	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	94,95	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	85,12	Baik

Berdasarkan tabel tersebut secara umum perolehan nilai per unsur diatas 85, namun ada dua unsur pelayanan yang menjadi perhatian yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian serta Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yang masih memperoleh nilai di bawah 85.

Sedangkan nilai terbaik di unsur Biaya/tarif dan sarpras.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bahwa system, mekanisme dan prosedur di masing-masing gerai tidak semuanya selaras, disebabkan pelayanan meliputi gerai OPD pada Pemda Banyumas serta gerai-gerai instansi vertical. Sehingga adanya salah satu gerai yang pelayanannya kurang bagus akan mempengaruhi penilaian terhadap MPP secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pembenahan dengan melibatkan instansi induknya.

Terhadap waktu penyelesaian yang nilainya masih kurang, berdasarkan evaluasi bahwa dokumen pemohon yang kurang lengkap telah muncul notifikasi di system untuk dilengkapi oleh pemohon, namun dalam hal ini pemohon tidak aktif melakukan cek di system sehingga waktu perizinan menjadi lebih panjang. Untuk hal ini akan dilakukan upaya untuk melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan serta memberikan layanan notifikasi by phone. Waktu yang Panjang juga disebabkan karena rekomendasi teknis dari OPD terkait cukup memakan waktu yang lama dikarenakan jumlah SDM ataupun kemampuan yang terbatas dalam proses rekomtek, sehingga berdasarkan hal ini perlu upaya koordinasi Kembali dg OPD terkait untuk mencari solusi terhadap keterbatasan tersebut.

Tabel. 3.6
CAPAIAN KINERJA TUJUAN II (DUA) DARI TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	500.000.000.000	1.021.561.268.294	204,31%	545.000.000.000	1.637.794.413.773,09	300,51%

Penjelasan :

TUJUAN II : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah Nilai realisasi investasi

Jumlah Nilai realisasi investasi Tahun 2022 di RPJMD target Rp.545.000.000.000,- dan realisasinya Rp 1.637.794.413.773,09 atau 300,51%.

Berdasarkan Realisasi investasi tersebut dirinci berdasarkan PMA, PMDN dan per sector sebagaimana table berikut :

Tabel 3.7
 Realisasi Investasi Per sektor

NO	SEKTOR	LKPM NON UMK		LKPM UMK	NON LKPM / MIKRO	JUMLAH
		PMA	PMDN			
1	SEKTOR PRIMER	Rp -	Rp 868.300.000	Rp 70.000.000	Rp 30.244.785.000	Rp 31.183.085.000
2	SEKTOR SEKUNDER	Rp 47.354.994	Rp 235.296.900.000	Rp 9.955.481.000	Rp 115.194.199.145	Rp 360.493.935.139
3	SEKTOR TERSIER	Rp 11.405.378.477	Rp 623.790.800.000	Rp 46.296.069.959	Rp 564.625.144.927	Rp 1.246.117.393.363
JUMLAH TOTAL		Rp 11.452.733.472	Rp 859.956.000.000	Rp 56.321.550.959	Rp 710.064.129.072	Rp 1.637.794.413.503

Jumlah Nilai realisasi investasi Tahun 2022 di RPJMD target Rp.545.000.000.000,- dan realisasinya Rp 1.637.794.413.773,09. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi LKPM skala non UMK Rp 871.408.733.742,09, LKPM skala UMK Rp 56.321.550.959,00 , Non LKPM Skala Mikro Rp 710.064.129.072,00. Rincian realisasi investasi adalah sbb :

- Sektor primer Rp 31.183.085.000 terdiri dari
 - PMDN Rp 31.183.085.000,00
 - PMA Rp 0,00
- Sektor Sekunder
 - Dengan realisasi Nilai investasi Rp 360.493.935.139 terdiri dari :
 - PMDN Rp 360.446.580.145,00
 - PMA Rp 47.354.994,00
- Sektor Tersier
 - Dengan realisasi Nilai investasi Rp 1.246.117.393.363 terdiri dari :
 - PMDN Rp 1.234.712.014.886,00
 - PMA Rp 11.405.378.477,00

Dari Nilai realisasi LKPM skala non UMK Rp 871.408.733.742,- terdiri :

- PMDN Rp 859.956.000.000,00
 - Sektor Primer Rp 868.300.000,00
 - Sektor Sekunder Rp 235.296.900.000,00
 - Sektor Tersier Rp 623.790.800.000,00
- PMA Rp 11.452.733.471,53
 - Sektor Primer Rp 0,00
 - Sektor Sekunder Rp 47.354.994,00
 - Sektor Tersier Rp 11.405.378.477,00

Dari Nilai realisasi LKPM skala UMK Rp 56.321.550.959,00 terdiri :

- PMDN Rp 56.321.550.959,00
 - Sektor Primer Rp 70.000.000 ,00
 - Sektor Sekunder Rp 9.955.481.000,00
 - Sektor Tersier Rp 46.296.069.959,00
- PMA Rp 0,00

Dari Nilai realisasi NonLKPM /skala Mikro Rp 710.064.129.072,00 terdiri :

- PMDN Rp 710.064.129.072,00,00
 - Sektor Primer Rp 30.244.785.000,00
 - Sektor Sekunder Rp 115.194.199.145,00
 - Sektor Tersier Rp 564.625.144.927,00
- PMA Rp 0,00

Sedangkan perkembangan Nilai investasiper triwulan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Investasi Kabupaten Banyumas
(Triwulan I-IV Bulan Januari - Desember Tahun 2022)

Target	Periode	Capaian Realisasi Berdasarkan			Percentase
		LKPM	Non LKPM (per semester)	Non LKPM Skala Mikro	
Rp 545.000.000.000	TW I	195.789.450.001,89	48.124.086.807	167.666.379.313	300,51
	TW II	388.584.895.183,43		170.973.476.144	
	TW III	165.152.216.968,94		186.958.548.291	
	TW IV	121.882.171.587,83		184.465.725.324	
	Jumlah	871.408.733.742,09	56.321.550.959	710.064.129.072	
	TOTAL		1.637.794.413.773,09		

Penjelasan atas capaian Indikator Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

RPJMD : target 90.0% realisasi 87,33% tingkat capaian 97.03%

RKPD : target 89.0% realisasi 87.33% tingkat capaian 98.12%

Hal tersebut menunjukkan target belum tercapai, hal ini dikarenakan beberapa komponen SKM mengalami penurunan dampak dari pemberlakuan PBG yang masih dalam proses penyempurnaan, sehingga pelayanan menjadi terhambat.

Solusi/TL : melakukan sosialisasi kembali kepada pelanggan melalui penjelasan langsung melalui pojok informasi mpp, melalui pertemuan ataupun melalui medsos/elektronik

Pengampu : Kepala Dinas /Sekretaris(Pengendali)/ Bidang Daldatin

2. Meningkatnya nilai investasi daerah

Indikator : Nilai investasi daerah

RPJMD : target 600 m realisasi 1.637,79 m tingkat capaian 272,97%

RKPD : target 545 m realisasi 1.637,79 m tingkat capaian 300,51%

Sedangkan Target investasi dari BKPM adalah 1,27 T sehingga pencapaian kinerja adalah 129%, ketentuannya adalah apabila pada akhir tahun belum mencapai target tahunan, maka akan sesuai arahan dari DPMPTSP Propinsi dapat mengambil realisasi keg usaha tidak wajib LKPM (usaha mikro risiko menengah tinggi, menengah dan rendah).

Solusi/TL : melakukan peningkatan pengendalian atas realisasi investasi dengan meningkatkan frekwensi serta lokus prioritas pembinaan dan pengawasan., serta melakukan penghitungan dan analisis data wajib LKPM dari data OSS RBA supaya dapat disajikan daftar kegiatan usaha wajib LKPM. Kemudian meningkatkan aktifitas penyelesaian masalah/kendala pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris (Pengendali)/Bidang Daldatin

b. Capaian Kinerja Sasaran

Terdapat dua sasaran yang telah tercapai yaitu :

1. Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tabel 3.9

**CAPAIAN KINERJA SASARAN I (SATU) DARI
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas indicator sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Sasaran : Indikator : Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public

RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat pencapaian 100%

Diiukur dari jml aduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah aduan dikali 100%.

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris (Pengendali)/Bidang Daldatin

2. Meningkatnya proyek investasi daerah

Tabel 3.10
CAPAIAN KINERJA SASARAN II DARI TAHUN
2021 DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya proyek investasi daerah Tabel	Pertumbuhan proyek investasi daerah	1%	78,74%	7874%	1%	43,13%	4313%

Penjelasan :

Indikator : Pertumbuhan proyek investasi daerah

RPJMD target 1% realisasi 43,13% tingkat capaian 4.313%

RKPD target 1% realisasi 43,13% tingkat capaian 4.313%

Diukur dari penghitungan realisasi proyek investasi LKPM tahun n (1032) dikurangi realisasi proyek investasi tahun n-1 (721) dibagi realisasi proyek investasi tahun n-1 (721) dikali seratus persen (triwulan on triwulan).

Terhadap realisasi yg terlalu tinggi dari target perlu dilakukan penghitungan ulang dan analisis terhadap realisasi proyek investasi, karena diindikasikan indicator ini kurang tepat karena besarnya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan proyek investasi, hal ini disebabkan tiap proyek punya kapasitas nilai investasi yang berbeda.

Solusi/TL : dilakukan penghitungan dan analisis data proyek investasi

Pengampu : Kepala Dinas/Sekretaris/Bidang Daldatin

Pertumbuhan proyek investasi dapat dilihat pada tabel 3.

Realisasi proyek investasi dan serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Realisasi Proyek Tahun 2022

Proyek	Realisasi Proyek Berdasarkan		
	LKPM Skala Non UMK	LKPM Skala UMK	Non LKPM Skala Mikro
PMA	41	208	19.141
PMDN	783	-	-
Jumlah	824	208	19.141
Total			20.173

Tabel 3.12

Serapan Tenaga Kerja Tahun 2022

Tenaga Kerja	Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan		
	LKPM Skala Non UMK	LKPM Skala UMK	Non LKPM Skala Mikro
TKI	1.022	1.047	49.506
TKA	-	-	-
Jumlah	1.022	1.047	49.506
Total			51.575

c. Perubahan/Tambahan kinerja Sasaran kepala OPD

Tabel 3.13
CAPAIAN KINERJA SASARAN III DARI TAHUN 2021
DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Pengaduan Masyarakat Berulang	-	-	-	0%	0%	0%

Penjelasan :

- Indikator : Pengaduan Masyarakat Berulang

RPJMD :Target 0% Realisasi 0% Tingkat Capaian 0%

RKPD : Target 0% Realisasi 0% Tingkat Capaian 0%

Terdapat 71 aduan berupa keluhan pada tahun 2022 yang kesemuanya tidak berulang.

Tidak berulang ini dengan kriteria dengan obyek yang sama, pengadu yang sama, substansi yang sama.

Tabel 3.14
CAPAIAN KINERJA SASARAN IV DARI TAHUN 2021
DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Pengaduan yang terselesaikan sesuai yang diperjanjikan	-	-	-	100%	100%	100%

Penjelasan :

- Indikator : Pengaduan yang terselesaikan sesuai yang diperjanjikan
- RPJMD :Target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%
- RKPD :Target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%
- Pengaduan (keluhan) dapat terselesaikan dengan kurun waktu kurang dari 10 hari atau melebihi 10 hari. Untuk yang melebihi waktu 10 hari dilakukan perjanjian waktu penyelesaiannya. Untuk Tahun 2022 dengan jumlah 71 aduan keluhan waktu penyelesaian kesemuanya di bawah 10 hari.

Tabel 3.15
CAPAIAN KINERJA SASARAN V DARI TAHUN 2021
DAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	Persentase usaha yang berizin	-	-	-	100%	30,81%	308%

Penjelasan :

- Indikator : Persentase usaha yang berizin

RPJMD :Target 20% realisasi 30,81% tingkat capaian 154%

RKPD :Target 100% realisasi 30,81% tingkat capaian 308%

Diukur dari realisasi kegiatan usaha berijin sejumlah 26.762 keg usaha dibagi jumlah kegiatan usaha sejumlah 86.875 keg usaha dikali seratus persen. Tiap tahun diproyeksikan ada 10 % kegiatan usaha tiap tahun memperoleh perizinan, sehingga dalam 2 tahun yaitu 2022 – 2023 diproyeksikan 20% dari 86.875 keg usaha memperoleh perizinan.

Untuk menggambarkan capaian kinerja kepala DPMPTSP Tahun 2022 disajikan pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut.

d. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Program

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Program Tahun 2022

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKP D 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKP D 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4				
PROGR AM 1														
1.1	Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	NON KUMULATIF/POSITIF	%	80	68.57	75	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGR AM 2														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV	
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4					
2.1	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	NON KUMULATIF/POSITIF	%	85	100	80	25	75	75	100	100	125	●	117.65	●
PROGR AM 3															

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4				
3.1	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	NON KUMULATIF/POSITIF	%	90	100	90	100	100	100	100	111.11	●	111.11	●
PROGR AM 4														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV	
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4					
4.1	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	NON KUMULATIF/POSTIF	%	90	131.42	88	52.96	78.26	117.71	117.71	117.71	133.76	●	130.79	●
PROGR AM 5															
5.1	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	NON KUMULATIF/POSTIF	%	85	0	80	100	100	100	100	100	125	●	117.65	●
PROGR AM 6															

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4				
6.1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	100	100	100	100	100	100	100	●	100	●
6.2	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	96.27	100	21.6	35.77	68.02	97.01	97.01	▶	97.01	▶
6.3	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	NON KUMULATIF/POSITIF	%	100	100	100	0	0	0	100	100	●	100	●

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan/Capai an	Satuan	Targ et Akhir RPJ MD	Realis asi Samp ai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capaian RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Tingkat Capaia n RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n 2022 Triwulan IV
						Targ et 2022	Re alis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Real isasi 4				
C6.4	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	NON KUMULATIF/POSTIF	%	100	100	100	100	100	100	100	100	●	100	●

Program :

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	100%	100%	100%	

Penjelasan :

Indikator :Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)

RPJMD : target 90% realisasi 100% tingkat capaian 111,11%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 111,11%

Diukur dari realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai sesuai SP dibagi penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.

Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra dan Sektor Pembangunan.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya dokumen pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	75%	0%	0%	

Penjelasan :

Indikator : Persentase pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal

RPJMD : target 80% realisasi 0% tingkat capaian 0%

RKPD : target 75% realisasi 0% tingkat capaian 0%

Diukur dari jumlah kegiatan usaha yang memperoleh insentif / kemudahan berusaha dibagi target pemohon/penerima insentif/kemudahan berusaha dikali seratus persen. Dalam hal ini belum terealisasi karena Perbup terkait fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha baru terbit pada akhir tahun 2022 yaitu pada bulan Nopember 2022, sehingga waktu untuk sosialisasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum dapat dilakukan. Untuk merealisasikan pemberian insentif dan atau kemudahan berusaha perlu dilakukan secara proaktif dengan jemput bola pada tahun akhir rpjmd, sehingga dapat mencapai ataupun mendekati dari target. Meskipun ada kemungkinan bahwa kegiatan usaha yang sesuai kriteria masih sedikit atau belum ada.

Solusi : lain yang terkait agar perda bisa segera terealisasi

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program Promosi Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya jumlah investor yang berminat menanamkan modal	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	80%	100%	125%	

Penjelasan :

Indikator : Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas

RPJMD : target 85% realisasi 100% tingkat capaian 117,65%

RKPD : target 80% realisasi 100% tingkat capaian 125%

Diukur dari realisasi Lol dengan realisasi 4 Lol dari target 4 Lol.

Solusi : aktif dalam memfasilitasi calon investor bila perlu jemput bola, sehingga keminatan investor akan meningkat dengan adanya fasilitasi / pelayanan yang maksimal.

Pengampu :PIPPM

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	88%	117,71%	133,76%	

Penjelasan :

Indikator : Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

RPJMD : target 90% realisasi 117,71 - tingkat capaian 130,79%

RKPD : target 88% realisas 117,71- tingkat capaian 133,76%

Diukur dari realisasi Investor (wajib LKPM) yang telah melaksanakan LKPM dibagi target dari BKPM dikali seratus persen

Solusi : pencapaian sudah cukup tinggi dari target BKPM, namun perlu peningkatan lagi karena apabila diukur dari jumlah investor yang wajib LKPM, maka capaian ini masih cukup kecil. Perlu pemilahan antara investor baru yg melaksanakan LKPM dan tambahan investasi oleh investor lama. Juga memperhitungkan investasi lama yg melaksanakan laporan tanpa tambahan investasi. Juga adanya laporan triwulanan yg merupakan kewajiban investor.

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya pengelolaan data informasi Penanaman Modal	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	80%	100%	125%	

Penjelasan :

Indikator : Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal

RPJMD : target 85% realisasi 100% tingkat capaian 117,65%

RKPD : target 80% realisasi 100% tingkat capaian 125%

Diukur dari realisasi penyajian data dibagi jumlah data dikali seratus persen.

Solusi : pencapaian sudah cukup tinggi, namun perlu pengembangan penyajian data untuk mendukung peningkatan pencapaian tujuan OPD

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya Pelayanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	100%	100%	
2		Daerah Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat	100%	97,01%	97,01%	
3		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
4		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	

Penjelasan :

A. Indikator : Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai

RPJMD : target 100 % realisasi 100% - tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100%- tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi pengadaan barang dibagi target pengadaan dikali seratus persen. Dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi : melakukan perencanaan pengadaan pada tahun berikutnya.

Pengampu : Sekretariat

B. Indikator : Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

RPJMD : target 100% realisasi 97,01% tingkat capaian 97,01%

RKPD : target 100% tercapai 97.01% tingkat capaian 97.01%

Diukur dari realisasi keuangan dibagi target keuangan dikali seratus persen/ Dalam hal ini masih sudah cukup tinggi pencapaiannya, sedangkan kinerja rata-rata sudah tercapai.

Solusi /TL: meningkatkan pencapaian kelancaran adm keu di periode berikutnya.

Pengampu : Sekretariat

C. Indikator : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

RPJMD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Diukur dari Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang sesuai dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus persen. Dalam hal ini kinerja telah tercapai.

Solusi / TL : mempertahankan ketercapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Pengampu : Sekretariat

D. Indikator : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum

RPJMD : target 100 % realisasi 100% tingkat capaian 100%

RKPD : target 100% realisasi 100% tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi administrasi umum (12 bln) dibagi jumlah administrasi umum (12 bln) dikali seratus persen. Dalam hal ini realisasi telah tercapai 100%.

Solusi/TL : melaksanakan administrasi umum dengan baik agar kegiatan penunjang ini dapat mendukung kelancaran kegiatan organisasi.

Pengampu : Sekretariat

Kegiatan :

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Perhit ungan	Satua n	Targ et Akhi r RPJ MD	Reali sasi Sam pai Tahu n 2021	Tahun 2022						Ting kat Cap aihan RKP D 202 2 s.d TW IV	Sta tus Ca pai an 202 2	Reali sasi RKP D s.d. Tahu n 2022	Tingk at Capai an RKP D s.d. 2022 Thd RPJM D	Status Capai an 2022 Triwulan IV
						Targe t 2022	Realis asi 1	Reali sasi 2	Reali sasi 3	Reali sasi 4	Reali sasi 2022 s.d. Triw ulan IV					
Kegiatan 1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1.1	Jumlah penetapan pemberian fasilitasi / insentif PM	KUMU LATIF - POSITIF		9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
2.1	Jumlah dokumen PM	KUMU LATIF - POSITIF		3	1	1	0	0	0	1	1	100	2	66,67		
Kegiatan 3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Perhit ungan	Satua n	Targ et Akhi r RPJ MD	Reali sasi Sam pai Tahu n 2021	Tahun 2022						Ting kat Cap aihan RKP D 202 2 s.d. TW IV	Sta tu s Ca pa ian 202 2	Reali sasi RKP D s.d. Tahu n 2022	Tingk at Capai an RKPD s.d. 2022	Thd RPJM D	Status Capai an 2022 Triwul an IV
						Targe t 2022	Realis asi 1	Realis asi 2	Realis asi 3	Realis asi 4	Realisasi 2022 s.d. Triw ulan IV						
3.1	Jumlah kegiatan Promosi PM	KUMU LATIF - POSITIF		7	1	3	0	1	1	1	3	100		4	57,14		
Kegiatan 4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																
4.1	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	KUMU LATIF - POSITIF		1500 0	1797 6	5000	2086	5182	1959 5	6842	3370 5	674, 1		5168 1	344,54		
Kegiatan 5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
5.1	Jumlah dokumen LKPM	KUMU LATIF - POSITIF		12	4	4	1	1	1	1	4	100		8	66,67		
Kegiatan 6	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Perhit ungan	Satua n	Targ et Akhi r RPJ MD	Realisasi Sam pai Tahu n 2021	Tahun 2022					Ting kat Cap aihan RKP D 202 2 s.d. TW IV	Sta tu s Ca pa ian 202 2	Realisasi RKP D s.d. Tahu n 2022	Tingk at Capai an RKPD s.d. 2022 Thd RPJM D	Status Capai an 2022 Triwulan IV
						Targe t 2022	Realis asi 1	Realisasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
6.1	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	KUMU LATIF - POSITIF		40.000	-	20.000	6.458	5.553	19.963	6.907	38.881	194,41	38881	97,20	
Kegiatan 7	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	KUMU LATIF - POSITIF		10	4	3	1	0	2	0	3	100	7	70,00	
Kegiatan 8	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
8.1	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	NON KUMU LATIF - POSITIF		2	2	2	2	2	2	2	2	100	4	100,00	
Kegiatan	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Perhit ungan	Satua n	Targ et Akhi r RPJ MD	Reali sasi Sam pai Tahu n 2021	Tahun 2022						Ting kat Cap aihan RKP D 202 2 s.d TW IV	Sta tu s Ca pa ian 202 2	Reali sasi RKP D s.d. Tahu n 2022	Tingk at Capai an RKPD s.d. 2022 Thd RPJM D	Status Capai an 2022 Triwul an IV
						Targe t 2022	Realis asi 1	Realis asi 2	Realis asi 3	Realis asi 4	Realisasi 2022 s.d. Triw ulan IV					
n 9																
9.1	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	KUMU LATIF - POSITIF		36	12	12	3	3	3	3	12	100	24	66,67		
Kegiatan 10	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
10.1	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	NON KUMU LATIF - POSITIF		2	2	2	0	0	0	1	1	50	1	50,00		
Kegiatan 11	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
11.1	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	NON KUMU LATIF - POSITIF		2	2	2	2	2	2	2	2	100	2	100,00		

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Perhit ungan	Satua n	Targ et Akhi r RPJ MD	Reali sasi Sam pai Tahu n 2021	Tahun 2022						Ting kat Cap aiian RKP D 202 2 s.d. TW IV	Sta tu s Ca pa ian 202 2	Reali sasi RKP D s.d. Tahu n 2022	Tingk at Capai an RKPD s.d. 2022 Thd RPJM D	Status Capai an 2022 Triwul an IV
						Targe t 2022	Realis asi 1	Realis asi 2	Realis asi 3	Realis asi 4	Realisasi 2022 s.d. Triw ulan IV					
Kegiatan 12	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
12.1	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	NON KUMU LATIF - POSI TIF		4	4	4	3	3	4	3	3	75		3	75,00	

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan pemberian fasilitas / insentif PM	3	0	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah penetapan pemberian fasilitas / insentif PM

RPJMD : target 9 bh realisasi 0 bh tingkat pencapaian 0%

RKPD : target 3 bh realisasi 0 bh tingkat pencapaian 0%

Diukur dari realisasi dok pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan berusaha PM. Belum terealisasi karena Perbup baru ditetapkan bulan Nopember 2022, selanjutnya belum ada pelaku usaha yang mengajukan insentif / kemudahan berusaha.

Solusi /TL : melakukan sosialisasi, melakukan proses segera apabila ada pengajuan insentif/kemudahan berusaha, serta melakukan upaya jemput bola terhadap investasi yang memenuhi kriteria.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.25

Capaian Kinerja Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya peta potensi investasi	Jumlah dokumen PM	1	1	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah dokumen PM

RPJMD : target 3 bh realisasi 2 bh tingkat pencapaian 66.67%

RKPD : target 1 bh realisasi 1 bh tingkat pencapaian 100%

Dikukur dari realisasi dok peta potensi/kajian potensi investasi, dalam hal ini telah direalisasikan.

Solusi /TL : melakukan perencanaan dok PM berupa pemetaan potensi pada periode tahun selanjutnya melalui kajian serta pemetaan potensi unggulan.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terselenggaranya promosi Penanaman Modal kabupaten	Jumlah kegiatan promosi PM	3	3	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan promosi PM

RPJMD : target 7 keg realisasi 4 keg tingkat pencapaian 57,14%

RKPD : target 3 keg realisasi 3 keg tingkat pencapaian 100%

Diukur dari realisasi dokumen kegiatan promosi. Dalam hal ini telah tercapai.

Pengampu : Bidang PIPPM

Solusi : melakukan persiapan/perencanaan promosi dengan optimal serta promosi pada berbagai media seperti medsos dan web sigaib pada periode tahun selanjutnya.

Tabel 3.27

Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	5.000 bh	33.705 bh	674,1%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu

RPJMD : target 15.000 bh realisasi 51.681 bh tingkat pencapaian 344,54%

RKPD : target 5.000 bh realisasi 33.705 bh tingkat pencapaian 674,1%

Diukur dari realisasi perizinan dan non perizinan. Dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi/ TL : Melakukan perencanaan penerbitan dokumen perizinan pada periode tahun selanjutnya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan Penanaman Modal	Jumlah dokumen LKPM	4 dok	4 dok	100%	

Indikator : Jumlah dokumen LKPM

RPJMD : target 12 dok realisasi 8 dok tingkat pencapaian 66.67%

RKPD : target 4 dok realisasi 4 dok tingkat pencapaian 100

Diukur dari realisasi dokumen LKPM. Dalam hal ini telah tercapai.

Pengampu : Bidang PIPPM

Solusi : melakukan persiapan/perencanaan pengendalian PM dengan optimal pada periode tahun selanjutnya dalam rangka mendukung realisasi investasi.

Tabel 3.29

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	20.000 data	38.881 data	194,41%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

RPJMD : target 40.000 data realisasi 38.881 data tingkat pencapaian 97,20%

RKPD : target 20.000 data realisasi 38.881 data tingkat pencapaian 194,41%

Diukur dari realisasi pengolahan data terintegrasi. Dalam hal ini telah tercapai.

Pengampu : Bidang Daldatin

Solusi : melakukan persiapan/perencanaan pengolahan data pada periode tahun selanjutnya, sehingga data tersebut akan bermanfaat untuk kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (realisasi investasi dan kepuasan masyarakat).

Tabel 3.30

Capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	3 dok	3 dok	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun

RPJMD : target 10 dok realisasi 7 dok tingkat pencapaian 70%

RKPD : target 3 dok realisasi 3 dok tingkat pencapaian 100%

Diukur dari realisasi dokumen evaluasi kinerja (LKjIP) 1 keg serta dokumen perencanaan kinerja 2 kegiatan (RKPD 2023 dan RKPD 2022 Perubahan). Dalam Hal ini telah tercpai.

Solusi/TL : melakukan perencanaan pada periode tahun selanjutnya.

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	2 jenis	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah administrasi keuangan yang dikelola

RPJMD target 2 jenis realisasi 2 jenis tingkat capaian 100%

RKPD target 2 jenis realisasi 2 jenis tingkat capaian 100%

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan Administrasi Umum	24 bln	24 bln	100%	

Penjelasan :

Indikator : Tersedianya pelayanan Administrasi Umum

RPJMD target 36 bln realisasi 24 bln tingkat capaian 66,67%

RKPD target 24 bln jenis realisasi 24 bln jenis tingkat capaian 100%

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	2 jenis	1 jenis	50%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah barang milik daerah yang tersedia

RPJMD : target 2 jenis realisasi 1 jenis tingkat pencapaian 50%

RKPD : target 2 jenis realisasi 1 jenis tingkat pencapaian 50%

Diukur dari target pengadaan barang dianggarakan di perubahan.

Solusi/TL : mengupayakan ketersediaan anggr untuk realisasi jenis barang yang dibutuhkan.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.34

Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia
RPJMD target 2 jenis realisasi 2 tingkat capaian 100%
RKPD 2 jenis realisasi 2 tingkat capaian 100%

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	3 jenis	75%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan
RPJMD target 4 jenis realisasi 3 tingkat capaian 75%
RKPD 4 jenis realisasi 3 tingkat capaian 75%
Diukur dari target jenis pemeliharaan barang dianggarakan di perubahan.
Solusi/TL : mengupayakan ketersediaan anggr untuk realisasi pemeliharaan jenis barang yang akan dilakukan.

- Sub Kegiatan :

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022						Tingkat Capai an RKPd 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPd s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPd 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4	Realisasi 2022 s.d. Triwulan IV					
Sub Kegiatan 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah															
1.1	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitasi / insentif	KUMULATIF - POSITIF		8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Kegiatan 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal															

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
2.1	Jumlah pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sektor perekonomian kesra dan pembangunan	KUMULATIF - POSITIF		225	35	100	25	39	31	10	105	105	140	62,22	Yellow
Sub Kegiatan 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan														Orange
3.1	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan aduan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	KUMULATIF - POSITIF		575	219	250	303	303	69	62	737	294,8	956	166,26	Green
Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha														Orange

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
4	Terintegrasi secara Elektronik														
4.1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	KUMULATIF - POSITIF		15150	19052	5050	2086	2990	19595	6852	31523	624,22		50575	333,83
4.2	Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik	NON KUMULATIF - POSITIF		214	0	214	194	194	194	1538	1538	718,69		1538	718,69
Sub Kegiatan 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
Sub Kegiatan 6	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
6.1	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	KUMULATIF - POSITIF		3	1	1	1	0	0	0	1	100		2	66,67

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
Sub Kegiatan 7	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
7.1	Jumlah dokumen pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan PM	KUMULATIF - POSITIF		10	24	3	0	0	0	0	0	0	24	240,00	Green
Sub Kegiatan 8	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
8.1	Jumlah dokumen RUPM K	KUMULATIF - POSITIF		2	0	1					0	0	0	0,00	Red
Sub Kegiatan 9	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
9.1	Jumlah evaluasi pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	KUMULATIF - POSITIF		6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Red

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
Sub Kegiatan 10	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota														
10.1	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	KUMULATIF - POSITIF		3	1	1	0	0	0	1	1	100	2	66,67	
Sub Kegiatan 11	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
11.1	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	KUMULATIF - POSITIF		7	1	3	0	2	0	1	3	100	4	57,14	
Sub Kegiatan 12	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
12.1	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	NON KUMULATIF - POSITIF		33	25	33	25	25	33	23	23	69,70	48	69,70	
Sub Kegiatan 13	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
13.1	Jumlah pengelola keuangan SKPD	NON KUMULATIF - POSITIF		14	10	14	14	14	14	12	12	85,71	22	85,71	
Sub Kegiatan 14	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
14.1	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	KUMULATIF - POSITIF		45	15	15	1	0	8	9	18	120,00	33	73,33	
Sub Kegiatan 15	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
15.1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		12	4	4	1	4	4	4	13	325,00	17	141,67	
Sub Kegiatan 16	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
16.1	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		52	12	20	4	2	3	8	17	85,00	29	55,77	
Sub Kegiatan 17	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
17.1	Jumlah logistik kantor yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		36	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	66,67	
Sub Kegiatan 18	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
18.1	Jumlah cetakan yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		5000 0	53096	17000	2079	1408 4	2302 3	14047	53233	313,14	1063 29	212,66	
Sub Kegiatan 19	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV	
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4						
19.1	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	KUMULATIF - POSITIF		680	413	250	11	54	19	58	142	56,80		555	81,62	
Sub Kegiatan 20	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
20.1	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		120	33	40				1	1	2,50		34	28,33	
Sub Kegiatan 21	X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
21.1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	KUMULATIF - POSITIF		11	4	4	0	0	1	0	1	25,00		5	45,45	
Sub Kegiatan	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
22															
22.1	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	KUMULATIF - POSITIF		36	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	66,67	
Sub Kegiatan 23	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
23.1	Jumlah Pegawai Non ASN	NON KUMULATIF - POSITIF		53	52	52	41	41	40	40	40	76,92	40	75,47	
Sub Kegiatan 24	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
24.1	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	NON KUMULATIF - POSITIF		24	22	24	7	13	12	11	11	45,83	11	45,83	
Sub Kegiatan 25	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
25.1	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	NON KUMULATIF - POSITIF		272	375	272	15	58	66	66	66	24,26	66	24,26	66
Sub Kegiatan 26	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
26.1	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	NON KUMULATIF - POSITIF		2	2	2	1	2	2	2	2	100,00	2	100,00	2
Sub Kegiatan 27	X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
27.1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	NON KUMULATIF - POSITIF		5	3	5	0	0	1	2	2	40,00	2	40,00	2
Sub Kegiatan 28	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan 29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
29.1	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan PM	KUMULATIF - POSITIF		36	34	12	2	4	0	0	6	50,00	40	111,11	
Sub Kegiatan 30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
30.1	Jumlah data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi	KUMULATIF - POSITIF		4	0	2	5	0	2	2	9	450,00	9	225,00	
Sub Kegiatan 31	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
31.1	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	KUMULATIF - POSITIF		7	3	2	0	0	1	1	2	100,00	5	71,43	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal														

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Perhitungan	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022					Tingkat Capai an RKPD 2022 s.d TW IV	Status Capai an 2022	Realisasi RKPD s.d. TW IV 2022	Tingkat Capaian RKPD 2022 Thd RPJMD	Status Capaia n s.d. 2022 Triwulan IV
						Target 2022	Realisasi 1	Realisi sasi 2	Realisasi 3	Realisasi 4					
32															
32.1	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan PM	KUMULATIF - POSITIF		21	40	7	1	40	19	10	70	1000,00		110	523,81
Sub Kegiatan 33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal														
33.1	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	KUMULATIF - POSITIF		36	43	12	10	8	85	9	112	933,33		155	430,56
Sub Kegiatan 34	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal														
34.1	Jumlah strategi promosi penanaman modal	KUMULATIF - POSITIF		3	1	1	0	0	0	0	0	0,00		1	33,33

Tabel 3.37

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	5.050 pelayanan	34.027 pelayanan	673,80%	

Penjelasan :

-Indikator : Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan

RPJMD : target 15.150 pelayanan realisasi 53.079 pelayanan tingkat pencapaian 350,36%

RKPD : target 5.050 pelayanan realisasi 34.027 pelayanan tingkat pencapaian 673,80 %

Diukur dari realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan, realisasi telah melampaui target. Hal ini karena karena optimalnya pelayanan perizinan serta gencarnya pelayanan perizinan melalui kegiatan gelas umi kece (Gerakan legalisasi usaha mikro kecil) ke kecamatan, desa ataupun kelembagaan lainnya.

Solusi /TL: realisasi tetap dimaksimalkan dengan dukungan kegiatan gelas umi kece yaitu pelayanan perizinan keliling/jemput bola ke para pelaku usaha/calon pelaku usaha.Hal ini mengingat belum semua UMKM terjangkau pelayanan perizinannya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra dan Sektor Pembangunan

- Indikator : Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik

RPJMD : target 214 jenis realisasi 1538 tingkat pencapaian 718,69%

RKPD : target 214 realisasi 1538 tingkat pencapaian 718,69%

Diukur dari realisasi jenis perizinan yang ada di MPP. Namun demikian berdasarkan UU Cipta kerja ada 1.368 jenis layanan perizinan yang dapat dilakukan pelayanannya di MPP. Ditambah pelayanan di gerai yang ada di MPP sebanyak 202 layanan.

Solusi/TL : melakukan koordinasi peningkatan jenis perizinan di MPP. Hal ini tidak serta merta dapat terbentuk, karena sesuai kebutuhan pelayanan perizinan, serta melakukan pelayanan jenis-jenis pelayanan perizinan sesuai UU Cipta kerja.

Pengampu : Bidang Pelayanan Perizinan/Tim Percepatan Berusaha Kabupaten Banyumas.

Jenis Pelayanan pada MPP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38
Jenis Pelayanan pada MPP Kab. Banyumas

No.	Instansi / OPD	Jenis Pelayanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. 82 Perizinan Non OSS (Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021) b. 1336 Perizinan OSS (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020)
2	Dinas Lingkungan Hidup	a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) b. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) e. Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. masih menggunakan lama sebelum PP 22 Tahun 2021 f. Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah g. Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi h. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan i. Pelayanan Permohonan Arahan Perubahan Izin Lingkungan j. Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun (IPLB3) Skala Kabupaten
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Pengajuan PKKPR / KKPR Non Berusaha b. Validasi Self Declaration c. Pengambilan Dokumen PKKPR d. Pelayanan Informasi Tata Ruang
4	Dinas Pekerjaan Umum	a. Pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung b. Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (lainnya)
5	Badan Pendapatan Daerah	a. Penetapan Pajak Reklame b. Pelayanan Pajak PBB c. Pelayanan Pajak Restoran d. Pelayanan Pajak Hotel
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Verifikasi Dokumen Kependudukan (LTSA-PTKLN)

No.	Instansi / OPD	Jenis Pelayanan
7	Dinas Perhubungan	a. Andalalin b. Pendaftaran KIR
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	a. Kartu Kuning (AK-1) b. Pendaftaran ID CPMI (LTSA-PTKLN) c. Penerbitan Rekomendasi Paspor (LTSA-PTKLN)
9	Dinas Kesehatan	a. Memberikan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan (LTSA-PTKLN) b. Verifikator dan Penerimaan Berkas Perizinan Layanan Fasyankes
10	Gerai Provinsi Jawa Tengah	a. Izin SIPPRA (Air Tanah) b. Izin Genset > 500 KVA, IUPTLS, IJUPTL (Kelistrikan) c. IUIPHHK (Kehutanan) d. Izin Pembukaan SMA, SMK dan SLB (Negeri / Swasta) e. Izin AKDP, Angkutan Barang Umum (Perhubungan) f. Izin UKOT, PBF Cabang, PAK Cabang , Laboratorium Medis Pratama (Izin Kesehatan)
11	Bank Jateng	a. Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto b. Payment Point Bank Jateng Cabang Koor Purwokerto c. Setoran Tunai d. Pembayaran pajak, PDAM, Paspor, Mahasiswa dan bpjs kesehatan e. Transfer kesesama Bank Jateng dan Antar Bank
12	Bank Jateng Syariah	a. Pelayanan Kantor Kas Bank Jateng Syariah Cabang Koordinator Purwokerto b. Payment Point Bank Jateng Ysriah Purwokerto c. Setoran Tunai Rekening Bank Jateng Syariah
13	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Tengah	a. Pelayanan Verifikasi Dokumen Akhir Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) b. Pelayanan Pembekalan Akhir Pemberangkatan CPMI c. Orientasi Prapemberangkatan CPMI d. Penerbitan e-KTKLN e. Pelayanan Pengaduan Kasus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonsia (PMI)
14	Polresta Banyumas	a. Penerbitan perpanjangan SKCK b. Rekomendasi SKCK c. Pelayanan Laporan Kehilangan d. Pengaduan Masyarakat
15	Taspen	a. Permohonan informasi Ketaspenan b. Permohonan Pembayaran Klim Hari Tua, c. Pensiunan, Jaminan Kecelakaan, dan Jaminan Kematian d. Permohonan mutasi kantor bayar e. Permohonan Usul SK. Janda

No.	Instansi / OPD	Jenis Pelayanan
		f. Permohonan Usul Penambahan Keluarga
16	BPJS Kesehatan	a. Pelayanan Informasi b. Pelayanan pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah c. Pelayanan Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah d. Penggantian Faskes
17	KPP Pratama	a. Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Pelayanan ID Billing
18	BPOM	a. Izin Edar Obat b. Izin Edat Obat Tradisional c. Izin Edar Kosmetik d. Izin Edar Suplemen Makanan e. Izin Edar Produk Pangan
19	BPJS Ketenagakerjaan	a. Pelayanan Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah b. Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah c. pendaftaran Program Jasa Konstruksi d. Pencetakan Kartu Kepesertaan Pekerja Migran Indonesia
20	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	a. Pelayanan Paspor Baru b. Penggantian Paspor Baru c. Pemberian Izin Tinggal Keimigrasian d. Perpanjangan Izin Tinggal
21	Kejaksaan Negeri Purwokerto	a. Pelayanan Tilang b. Pelayanan Konsultasi c. Pelayanan Hukum
22	Pengadilan Negeri Purwokerto	a. Pelayanan Pendaftaran Perkara b. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana c. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya d. Pelayanan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan uang secara perorangan dari/atau secara badan hukum menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara e. Pelayanan surat keterangan ijin riset di lingkup Pengadilan f. Pelayanan surat ijin besuk tahanan
23	Kejaksanaan Negeri Bayumas	a. Pelayanan Tilang b. Pelayanan Konsultasi c. Pelayanan Hukum
24	Pengadilan Negeri Banyumas	a. Pelayanan Pendaftaran Perkara b. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana c. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya d. Pelayanan Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan uang secara perorangan dari/atau secara badan hukum menjadi tanggung

No.	Instansi / OPD	Jenis Pelayanan
		<p>jawabnya yang merugikan keuangan Negara</p> <p>e. Pelayanan surat keterangan ijin riset di lingkup Pengadilan</p> <p>f. Pelayanan surat ijin besuk tahanan</p>
25	Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah	<p>a. Pelayanan Kekayaan Intelektual (HAKI)</p> <p>b. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU)</p>
26	Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<p>a. Layanan Informasi Pertanahan</p> <p>b. Layanan Ijin Peralihan Hak Tanah Pertanian</p> <p>c. Perubahan Hak : peningkatan HGB menjadi Hak Milik untuk perumahan, luas maksimal 200 M2</p>
27	Kantor Kementerian Agama	<p>a. Konsultasi dan pendaftaran nikah</p> <p>b. Sertifikat produk halal</p> <p>c. Ijin operasional pondok pesantren/LPQ/MDT</p> <p>d. Konsultasizakat dan wakaf</p> <p>e. Konsultasi haji dan umroh</p> <p>f. Ijin Madrasah</p>
28	Badan Narkotika Nasional	<p>a. Layanan edukasi penyuluhan bahya narkoba</p> <p>b. Test Urine untuk instansi (non perorangan)</p> <p>c. Informasi bahan kontak berupa leaflet, stiker dan sejenisnya</p> <p>d. Informasi tentang rehabilitasi (konsultasi dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika)</p> <p>e. Pengaduan penyalahgunaan narkoba</p> <p>f. Pembinaan siswa/mahasiswa kerja praktek lapangan/magang dan penelitian narkoba</p>
29	Balai Karantina Pertanian Cilacap	<p>Sertifikasi Ekspor*</p> <p>* Terbatas pada komoditas yang dapat dilakukan pemeriksaan di MPP</p> <p>Sertifikasi Domestik Keluar (Lalu lintas media pembawa antar pulau meliputi media pembawa hewan dan tumbuhan)</p>
30	Lapak Aduan Banyumas	<p>a. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui usulan, pertanyaan, informasi dan keluhan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas</p>
31	Samsat Banyumas	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>a. Pendaftaran Sinas</p> <p>b. Konsultasi Usaha Sektor Perindustrian</p> <p>c. Pendaftaran E-Katalog Lokal</p>
33	Badan Amil	<p>a. Pelayanan Zakat</p>

No.	Instansi / OPD	Jenis Pelayanan
	Zakat Nasional	b. Pelayanan Infaq dan Sedekah
	Klinik OSS	a. Pendampingan OSS b. Konsultasi

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terpantauya komitmen perizinan dan non perizinan PM	Jumlah pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sektor perekonomian kesra dan pembangunan	100 keg	105 keg	105%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sektor perekonomian kesra dan pembangunan

RPJMD : target 225 keg realisasi 140 keg tingkat pencapaian 62,22%

RKPD : target 100 keg realisasi 105 keg tingkat pencapaian 105%

Diukur dari realisasi pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan.

Solusi/TL : melakukan pemantauan komitmen diprioritaskan pada kegiatan pm dengan resiko tinggi seperti apotik, meskipun usaha tsb termasuk usaha dengan skala mikro (max investasi 1 miliar rupiah).

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan dan non perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan aduan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	250 layanan	737 layanan	294,8 %	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan aduan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan

RPJMD : target 575 layanan realisasi 956 layanan tingkat pencapaian 166.26%

RKPD : target 250 layanan realisasi 737 layanan tingkat pencapaian 294,8 %

Diukur dari realisasi pengaduan dan konsultasi. Dalam hal ini telah terealisasi dari target.

Solusi/TL : melakukan rencana layanan konsultasi dan pengelolaan aduan lebih lanjut melalui lapak aduan dan lewat media lainnya seperti surat, aduan langsung, serta melalui medsos (wa).

Pengampu : Bidang pelayanan penanaman modal dan Bidang Daldatin.

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas / insentif	4 keg	0 keg	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas / insentif

RPJMD : target 8 keg realisasi 0 keg tingkat pencapaian 0

RKPD : target 4 keg realisasi 0 keg tingkat pencapaian 0

Diukur dari kegiatan koordinasi pemberian fasilitas/insentif dengan pelaku usaha yg mengajukan insentif. Dalam hal ini perup tentang insentif baru ditetapkan Bulan Nopember 2022, belum ada pengajuan pemberian insentif/kemudahan berusaha sehingga belum ada keg koordinasi.

Solusi /TL: melakukan upaya realisasi Bersama Bid PIPPM serta mengintensifkan upaya realisasi pada periode tahun berikutnya.

Pengampu : Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan

Tabel 3.41

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dok	2 dok	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun

RPJMD : target 7 dok realisasi 5 dok tingkat pencapaian 71.43%

RKPD : target 2 dok realisasi 2 dok tingkat pencapaian 100%

Diukur dari realisasi dokumen perencanaan yaitu RKPD tahun 2023 dan RKPD 2022 perubahan. Dalam hal ini telah direalisasikan.

Solusi :/ TL mempersiapkan dokumen perencanaan yaitu RPD / RPJMD peralihan 2024-2026.

Pengampu : Subag Perencanaan

Tabel 3.42

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dok	1 dok	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun

RPJMD : target 3 dok realisasi 2 dok tingkat pencapaian 66,67%

RKPD : target 1 dok realisasi 1 dok tingkat pencapaian 100%

Diukur dari realisasi dokumen evaluasi kinerja. Telah realisasi berupa dokumen LKjIP.

Solusi /TL : mempersiapkan dokumen evaluasi kinerja untuk periode tahun selanjutnya.

Pengampu : Subag Perencanaan

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	33 org	23 org	69,7%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya

RPJMD : target 33 org realisasi 23 org tingkat pencapaian 69,7%

RKPD : target 33 org realisasi 23 org pencapaian 69,7%

Diukur dari realisasi pembayaran gaji ASN dalam hal ini berjumlah 23 org.

Ada PNS yg telah memasuki usia pensiun.

Solusi/TL : Anggaran disesuaikan dengan jumlah riil pegawai.

Pengampu : Subag Keuangan

Tabel 3.44

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	14 org	12 org	85,71%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah pengelola keuangan SKPD

RPJMD : target 14 org realisasi 12 org tingkat pencapaian 85,71%

RKPD : target 14 org realisasi 12 org tingkat pencapaian 85.71%

Diukur Jumlah pengelola keuangan SKPD yang terbayarkan honornya.

Dalam hal ini 12 org dari target 14 org.

Solusi /TL : anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Pengampu : Subag Keu/Subag Umpeg

Tabel 3.45

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15 jenis	18 jenis	120%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia

RPJMD : target 45 jenis realisasi 33 jenis tingkat pencapaian 73.33%

RKPD : target 15 jenis realisasi 18 jenis tingkat pencapaian 120%

Diukur dari realisasi pengadaan komponen listrik. Dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi / TL : melakukan identifikasi komponen listrik yg diperlukan.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.46

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 bh	13 bh	325%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

RPJMD : target 12 bh realisasi 17 bh tingkat capaian 141.57%

RKPD : target 4 bh realisasi 13 bh tingkat pencapaian 325%

Diukur dari realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi/TL : melakukan perencanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk periode tahun berikutnya

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.47

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dibagi	20 bh	17 bh	85%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia dibagi

RPJMD : target 52 bh realisasi 29 bh tingkat capaian 55.77%

RKPD : target 20 bh realisasi 17 bh tingkat pencapaian 85%

Diukur dari realisasi pengadaan peralatan rumah tangga. Dalam hal ini telah terealisasi, meskipun secara persentase masih kurang karena menyesuaikan dengan pagu anggaran dan kebutuhan barang.

Solusi/TL : melakukan upaya realisasi pengadaan komponen listrik apabila masih diperlukan.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.48

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12 bln	12 bln	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah logistik kantor yang tersedia

RPJMD : target 36 bulan realisasi 24 bulan tingkat capaian 66.67%

RKPD : target 12 bulan realisasi 12 bulan realisasi 100%

Diukur dari realisasi penyediaan logistic kantor. Dalam hal ini telah tercapai.

Solusi/TL : melakukan perencanaan penyediaan logistic kantor untuk periode tahun selanjutnya dengan lebih tepat berdasarkan kebutuhan yang urgent.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.49

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	17.000 lbr	53.233 lbr	313,14%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah cetakan yang tersedia

RPJMD : target 50.000 lbr realisasi 106.329 lbr tingkat capaian 212.66%

RKPD : target 17.000 lbr realisasi 53.233 lbr tingkat capaian 313.14%

Diukur dari realisasi barang cetakan,dalam hal ini telah terealisir pengadaan leaflet dan penggandaan/foto copy.

Solusi/TL : merencanakan pengadaan barang cetakan sesuai kebutuhan organisasi untuk periode tahun selanjutnya.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.50

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi	250 keg	142 keg	65,8%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Koordinasi/Konsultasi

RPJMD : target 680 keg realisasi 555 keg tingkat capaian 81,62%

RKPD : target 250 keg realisasi 142 keg tingkat capaian 65,8%

Diukur dari realisasi kegiatan koordinasi/konsultasi. Dalam hal ini capaian belum maksimal karena menyesuaikan anggaran.

Solusi /TL : melaksanakan realisasi kegiatan rapat-rapat dan koordinasi secara maksimal.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.51

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	40 bh	1 bh	2,5%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia

RPJMD : target 120 bh realisasi 34 bh tingkat capaian 28.33%

RKPD : target 40 bh realisasi 1 bh tingkat capaian 2.5%

Diukur dari realisasi pengadaan peralatan dan mesin kantor. Dalam hal ini belum ada anggaran di DPA induk. Pada perubahan anggaran ada tambahan pengadaan untuk mesin antrian sejumlah 1 paket/unit.

Solusi/TL : mengidentifikasi kembali pengadaan peralatan dan mesin kantor dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.52

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	4 jenis	1 jenis	45,5%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia

RPJMD : target 11 jenis realisasi 5 jenis tingkat capaian 45,45%

RKPD : target 4 jenis realisasi 1 jenis tingkat capaian 25%

Diukur dari realisasi penyediaan sarana prasarana Gedung kantor pada 2 lokasi yaitu kantor DPMPTSP serta MPP. Penyediaan sarpras dilakukan pada memenuhi kebutuhan sarpras pelayanan public. Dalam hal ini belum tercapai, karena terbatasnya anggaran.

Solusi/TL : melakukan perencanaan pengadaan sarpras untuk periode tahun berikutnya.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.53

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12 bln	12 bln	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola

RPJMD : target 36 bln realisasi 24 bln tingkat capaian 66.67 %

RKPD : target 12 bulan realisasi 12 bln tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang terbayarkan. Dalam hal ini sudah terelasasi.

Solusi /TL : melakukan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan jasa penunjang.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terdedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	52 org	52 org	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Pegawai Non ASN

RPJMD : target 52 realisasi 52 org tingkat capaian 100%

RKPD : target 52 orang realisasi 52 org tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi pembayaran honor non ASN. Dalam hal ini telah terealisasi 52 karena terdiri dari tenaga non ASN 41 orang serta outsourcing (penjaga mpp dan petugas kebersihan mpp 11 orang).

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.55

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	24 unit	11 unit	45,83%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara

RPJMD : target 24 unit realisasi 11 unit tingkat capaian 45,83%

RKPD : target 24 unit realisasi 11 unit tingkat capaian 45,83%

Diukur dari realisasi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, dalam hal ini masih Sebagian yang dilakukan pemeliharaan, karena pemeliharaan akan dilakukan secara bertahap terhadap kend yg mengalami kerusakan ataupun utk pemeliharaan rutin. Terjadinya beberapa kerusakan berat sehingga anggaran banyak terserap utk kerusakan tsb. Sebagian kendaraan roda dua yang rusak telah dikembalikan ke Bidang Aset BKAD. Jumlah kendaraan telah berkurang menjadi ... karena asset kendaraan yg sudah tidak layak telah dikembalikan ke BKAD.

Solusi/TL : mengidentifikasi kembali kerusakan yg mungkin terjadi pada kendaraan dinas serta sisa anggaran serta pemeliharaan rutin pada kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi bagus serta layak utk digunakan.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.56

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	272 unit	66 unit	24,26%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara

RPJMD: target 272 unit realisasi 66 unit tingkat capaian 24.26%

RKPD : target 272 unit realisasi 66 unit tingkat capaian 24,26%

Diukur dari realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, yg dilakukan berdasarkan kerusakan peralatan dan mesin kantor serta anggar yang terbatas.

Solusi /TL : melakukan identifikasi terhadap kerusakan peralatan dan mesin kantor, agar segera diketahui peralatan dan mesin yg benar-benar membutuhkan perawatan agar selalu siap dan layak untuk digunakan dalam pekerjaan kantor.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.57

**Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	2 unit	2 unit	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara

RPJMD : target 2 unit realisasi 2 unit tingkat capaian 100%

RKPD : target 2 unit realisasi 2 unit tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi pemeliharaan Gedung yang menyangkai pada 2 lokasi yaitu kantor DPMPTSP serta MPP. Pemeliharaan dilakukan pada bagian-bagian Gedung yang memang memerlukan perawatan.

Dalam hal ini telah terealisasi.

Solusi / TL : melakukan identifikasi terhadap bagian-bagian Gedung yang memerlukan perbaikan utk perencanaan periode tahun berikutnya.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.58

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	5 jenis	2 jenis	40%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara

RPJMD : target 5 jenis realisasi 2 jenis tingkat capaian 40%

RKPD : target 5 jenis realisasi 2 jenis tingkat capaian 40%

Diukur dari realisasi pemeliharaan sarana prasarana Gedung kantor pada 2 lokasi yaitu kantor DPMPTSP serta MPP. Pemeliharaan sarpras dilakukan pada sarpras yang mengalami kerusakan/membutuhkan perawatan. Serta anggaran yang terbatas.

Solusi/TL : melakukan identifikasi terhadap sarpras yang memerlukan perbaikan/perawatan.

Pengampu : Subag Umpeg

Tabel 3.59

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Dokumen Penetapan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan PM	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	3 dok	0 dok	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah dokumen pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM

RPJMD : target 10 dok realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

RKPD : target 3 dokumen realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

Diukur dari realisasi pemberian fasilitas/insentif ataupun kemudahan berusaha, dalam hal ini perbub no 61 tahun 2022 baru ditetapkan bulan Nopember 2022. Belum ada pemberian insentif.

Solusi /TL : secara proaktif melakukan fasilitasi kepada para pelaku usaha yg mengajukan insentif dan kemudahan berusaha, serta dilakukan sosialisasi kepada calon investor pada periode tahun berikutnya .

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.60

**Capaian Kinerja Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Evaluasi pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal	3 keg	0 keg	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah evaluasi pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal

RPJMD : target 6 keg realisasi 0 keg tingkat capaian 0%

RKPD : target 3 keg realisasi 0 keg tingkat capaian 0%

Diukur dari realisasi kegiatan evaluasi pemberian fasilitas/insentif ataupun kemudahan berusaha, dalam hal ini penetapan perbup tentang fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha baru ditetapkan Bulan Nopember 2022. Belum ada pengajuan terkait insentif/ kemudahan berusaha dari pelaku usaha, sehingga blm bisa dilakukan evaluasi.

Solusi /TL : melakukan evaluasi internal yaitu identifikasi kegiatan usaha yg dapat memperoleh insentif/kemudahan berusaha dg memperhatikan kriteria dalam perbup dan perencanaan sosialisasi yang diperlukan kepada calon investor.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.61

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RUPM K	Jumlah dokumen RUPM K	1 dok	0 keg	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah dokumen RUPM K

RPJMD : target 2 dok realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

RKPD: target 1 dokumen realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

Diukur dari realisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK), dalam hal ini kemungkinan masih tertunda karena berdasarkan Pemendagri No. 050/5889/2021 tentang pemutakhiran indicator kinerja Sub kegiatan yaitu jumlah peraturan daerah tentang RUPMK.

Solusi /TL : melakukan perubahan target kinerja dan melakukan penelaahan kembali terkait Perda RUPMK sebelumnya yaitu Perda Tahun 2013, apa yg diperlukan untuk perubahan, sehingga sebagai bahan analisis untuk naskah akademik / perubahan perda RUPMK, dimana Perda RUPMK berlaku sd Tahun 2025.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.62

**Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	1 dok	1 dok	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia

RPJMD : target 3 dok realisasi 2 dok tingkat capaian 66.67%

RKPD : target 1 dokumen realisasi 1 dok tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi peta potensi investasi berupa pemetaan potensi unggulan, kajian-kajian atas potensi serta pemetaan lahan potensi investasi, dilakukan secara bertahap.

Solusi/TL : melakukan aktifitas pemetaan potensi unggulan, kajian-kajian potensi investasi.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.63

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Tersusunnya strategi promosi PM	Jumlah strategi promosi penanaman modal	1 dok	0 dok	0%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah strategi promosi penanaman modal

RPJMD : target 3 dok realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

RKPD : target 1 dok realisasi 0 dok tingkat capaian 0%

Diukur dari dokumen strategy promosi PM yang disusun. Dalam hal ini masih nol karena berdasarkan permendagri yg no 050/5889/2021 bahwa indikatornya adalah jumlah peraturan daerah tentang strategy promosi, sehingga harus melalui proses penyusunan naskah akademik dan draft perda.

Solusi/TL : merencakan keg penyusunan perda strategy promosi pada tahun 2024

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.64

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan promosi PM	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	3 keg	3 keg	100%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal

RPJMD : target 7 keg realisasi 4 keg tingkat capaian 57.14%

RKPD : target 3 keg realisasi 3 keg tingkat capaian 100%

Diukur dari realisasi promosi pm. Dalam hal ini telah dilakukan kegiatan promosi investasi melalui event APIKMAS, event promosi di kab. Kebumen, serta promosi one on one meeting. Dalam hal ini telah realisasi.

Solusi/TL : melengkapi kegiatan promosi penanaman modal melalui event, one on one meeting, forum atupun melalui medsos.

Pengampu : Bidang PIPPM

Tabel 3.65

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan PM	12 keg	6 keg	50%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan PM

RPJMD : target 36 keg realisasi 40 keg tingkat capaian 111.11%

RKPD : target 12 keg realisasi 6 keg tingkat capaian 50%

Diukur dari kegiatan pemantauan pelaksanaan PM yaitu pemantauan pada kegiatan usaha sehingga terdeteksi kendala-kendala di lapangan. Namun karena dimungkinkan ada perubahan aktifitas menjadi penyelesaian masalah/kendala, sehingga keg pemantauan dialihkan ke pembinaan pm.

Solusi /TL ; menghitung kembali target pemantauan, karena akan dipindahkannya target pemantauan menjadi penyelesaian masalah dan dimungkinkan akan masuk dalam kegiatan pembinaan pm ataupun pengawasan pm.

Pengampu : Bidang Daldatin

Tabel 3.66

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan PM	7 keg	70 keg	1000%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan PM

RPJMD : target 21 keg realisasi 110 keg tingkat capaian 523.81%

RKPD : Target 7 keg kegiatan realisasi 70 keg tingkat capaian 1000%

Diukur dari realisasi kegiatan pembinaan penanam modal (PM) kepada para pelaku usaha yang dikumpulkan dalam satu forum pembinaan, pembinaan keluar serta penyelesaian masalah . Dalam hal ini telah terealisir.

Solusi / TL : melakukan perncanaan pembinaan pm pada periode tahun berikutnya.

Pengampu : Bidang Daldatin

Tabel 3.67

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	12 keg	112 keg	933,33%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM

RPJMD : target 36 keg realisasi 155 keg tingkat capaian 430.56%

RKPD : Target 12 kegiatan realisasi 112 keg tingkat capaian 933,33%

Diukur dari realisasi kegiatan pengawasan penanam modal (PM) kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini telah terealisasi. Target pengawasan minimal ditentukan oleh BKPM pusat.

Solusi / TL : melakukan perencanaan pembinaan PM pada periode tahun selanjutnya.

Pengampu : Bidang Daldatin

Tabel 3.68

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi	2 jenis	9 jenis keg	450%	

Penjelasan :

Indikator : Jumlah data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi

RPJMD target 4 jenis realisasi 9 jenis tingkat capaian 225%

RKPD target 2 jenis realisasi 9 jenis tingkat capaian 450%

Diukur dari realisasi data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan yaitu data sekunder LKPM, perijinan OSS. Dalam hal ini realisasi belum distandar dari awal, sehingga realisasi penyajian dan penginformasian data menjadi bias. Melihat dari jenis data yang diolah adalah dari 2 jenis data tersebut, namun harus ditentukan dulu data yang seperti apa dan dari data tersebut akan dikembangkan menjadi data apa, agar data menjadi berguna untuk kepentigan organisasi. Karena berdasar kebutuhan maka data yang dapat disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan adalah dokumen Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM), kemudian Dokumen Laporan Realisasi perijinan berusaha (OSS) dan realisasi perijinan non berusaha (non OSS). LKPM disususun triwulanan. Sedang OSS dan non OSS dibuat laporan tiap bulan. Melihat realisasi 9, dalam hal ini adalah produk turunan dari data OSS (penyajian data per sector), hal ini karena diminta oleh pihak luar yaitu terkait sector peternakan dan BPS.

Solusi / TL : menentukan terlebih dahulu kriteria data yang dibutuhkan oleh organisasi serta produk turunan apa saja yang diproyeksikan untuk diproses. Dengan melihat data sumber yang ada yaitu data sekunder OSS, NON OSS, dan LKPM, maka dalam ini yang disajikan adalah data turunan dari data sekunder tersebut. Data turunan yang dapat disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan pelayanan perizinan terintegrasi adalah :

1. LKPM
2. Laporan perijinan OSS RBA dan Non OSS (diolah)
3. Padanan data Kegiatan Usaha (UMKM dan usaha besar) dengan Data kegiatan usaha berijin (OSS RBA)

4. Padanan data kegiatan usaha berijin (OSS-RBA) dengan data wajib LKPM

Paling tidak 2 data telah disajikan dan diinformasikan yaitu no 1 dan 2, namun untuk no 3 belum.

- Nomor 3 adalah untuk melakukan pemanfaatan data individu antar kegiatan usaha berijin dengan kegiatan usaha yang ada. Pemanfaatan data ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran dan tindak lanjut berupa intervensi terhadap individu kegiatan usaha berupa legalisasi usaha. Pemanfaatan data ini dapat pula dimanfaatkan untuk mendukung kinerja utama (kepala dinas) yaitu Persentase kegiatan usaha berijin. Dalam hal ini memerlukan operator/pengolah data ataupun aplikasi pemanfaatan data.
- Nomor 4 adalah untuk melakukan pemanfaatan data antara individu Kegiatan usaha (wajib LKPM) dengan Usaha telah berijin wajib LKPM (usaha kecil, menengah, usaha besar serta usaha mikro berisiko tinggi). Pemanfaatan data ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi kegiatan usaha berijin yang dapat menjadi asset dan ditindaklanjuti untuk dapat merealisasikan investasinya / LKPM. Dalam hal ini memerlukan operator/pengolah data ataupun aplikasi pemanfaatan data.

Pengampu : Bidang Daldatin (pengolah data LKPM, kegiatan usaha berijin, serta kegiatan usaha wajib LKPM) dan Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra (sumber data sekunder dan pengolah OSS dan non OSS) serta Sekretariat (Pengendali).

5. Data Pengaduan

Dalam hal ini perlu dibuat laporan data pengaduan sebagai bukti laporan pengendalian atas pengaduan. Daftar pengaduan dilengkapi dengan respon, Tahapan proses disertai bukti proses serta penyelesaian aduan, yg merupakan pengembangan dari data yang diambil dari lapak aduan.

6. Data survey kepuasan masyarakat

Dalam hal ini telah dilakukan pengolahan data dari data sekunder aplikasi Susanmas.

Tindak Lanjut : data-data yang telah diolah dan dibuatkan laporan supaya disajikan di website DPMPTSP melalui aplikasi e office ataupun diupload di aplikasi SIGAIB milik DPMPTSP Kab. Banyumas.

C. Akuntabilitas Keuangan

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Total anggaran yang ada pada DPMPTSP Rp. 8.025.858.543 (delapan milyar dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah DaerahRp. 7.007.815.243
- Anggaran Urusan Penanaman Modal Rp. 1.018.043.300

Anggaran tersebut telah direalisasikan pada program dan sub kegiatan yang dapat dilihat berdasarkan tabel

Tabel 3.69
Realisasi Keuangan per Program Tahun 2022

Nama Program/Keg	Pagu	Realisasi	Sisa	Tingkat capaian (%)
Program Pelayanan Penanaman Modal	261.523.200	245.080.829	16.442.371	93,71
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	68.780.000	58.167.834	10.612.166	84,57
Program Promosi Penanaman Modal	174.080.300	158.543.588	15.536.712	91,07
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	361.046.000	32.348.000	91,78
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	120.265.800	116.603.800	3.662.000	96,96
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.007.815.243	6.846.833.977	160.981.266	97,70
	8.025.858.543	7.786.276.028	239.582.515	97,01

Adapun anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut: :

Tabel 3.70
ANGGARAN YANG MENDUKUNG SASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	JML INDIKA TOR	ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1	Rp. 261.523.200	Rp 245.080.829	93,71%
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	Rp756.520.100	Rp 694.361.222	91,78%
JUMLAH			Rp. 1.018.043.300	Rp 939.442.051	92,28%

Penjelasan :

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Program-program yang mendukung sasaran I (satu) adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan total anggaran Rp. 261.523.200,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) di dukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 261.253.200,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran Rp. 202.035.200 (Dua Ratus Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 37.498.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan anggaran Rp. 21.990.000 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Sasaran II : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Program-program yang mendukung sasaran II (dua) adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan total anggaran Rp. 68.780.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) di dukung 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 41.340.000 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 41.340.000 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 27.440.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 27.440.000
- PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL dengan total anggaran Rp. 174.180.300,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) di dukung 1 (satu) kegiatan yaitu :
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 174.180.300,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 41.454.000 (Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 132.626.300 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah)

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total anggaran Rp. 393.394.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) di dukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :
- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 393.394.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran 8.626.000 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran 298.801.500 (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran 85.966.500 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Tabel 3.71
Efektivitas Anggaran Terhadap
Capaian Sasaran DPMPTSP
Kabupaten Banyumas Tahun 2022

NO	Sasaran	Jumlah Indikator sasaran	Prosentase rata rata capaian kinerja	Realisasi (Rp)	Prosentase Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1 (satu)	98,12%	Rp 245.080.829	93,71 %
2	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1 (satu)	300,51%	Rp 694.361.222	91,78 %

Tujuan I : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan capaian kinerja 98,12% , capaian tersebut di ukur dari 1 (satu) indikator. dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat target A (89), realisasi A (87,33)

Tujuan II : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah 300,51% (sangat tinggi) capaian tersebut di ukur dari 1 (satu) indikator, dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Indikator Nilai investasi daerah dengan target Rp 545.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 963.513.153.641,- (300,51%)

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik dimana salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.72
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

NO	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata – rata capaian kinerja sasaran strategis	Persentase realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1	98,12%	93,71 %	4,41 %
2.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	300,51%	91,78 %	208,73%

Nilai capaian investasi 300,51 % dari target disebabkan :

1. Karena ada upaya terus menerus dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada para investor dalam rangka merealisasikan investasinya dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga masih cukup banyak investor melaporkan perkembangan investasinya.
2. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP), menyebabkan perizinan menjadi cepat dan murah sehingga menopang peningkatan realisasi investasi..
3. Adanya peningkatan iklim investasi yang semakin mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas, dengan berbagai fasilitasi dan kemudahan dalam berusaha.
4. Berkembangnya inovasi pelayanan perizinan melalui jemput bola kepada calon investor/pelaku usaha melalui inovasi gelas umi kece (legalisasi usaha mikro kecil)

Namun demikian terhadap pencapaian kinerja persentasi pertumbuhan nilai investasi dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari Rp 1.021.561.268.294,00 menjadi Rp 1.637.794.413.503,00 atau 60,33%. Sehingga capaian kinerjanya adalah 3.016% dari target 2%. Sedangkan indicator ini menjadi salah satu Kinerja Pemkab. Kenaikan diperoleh dari penjumlahan realisasi investasi LKPM dan non LKPM (usaha mikro) sebagaimana diterangkan pada bab sebelumnya. Sehingga capaian Tahun 2022 tidak murni dari LKPM sebagaimana capaian Tahun 2021.

Kendala-kendala dan solusi yang dapat dilakukan terhadap realisasi investasi dari LKPM dalam mendukung kinerja Pemkab adalah sebagai berikut :

Kendala :

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari pelaku usaha atas kewajiban pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
2. Kurangnya jumlah petugas Fasilitator penyampaian pelaporan LKPM dan adanya error system.
3. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Banyumas sehingga investasi skala besar belum terlaksana.
4. Kurangnya kajian investasi dan kesediaan lahan yang siap untuk investasi.
5. Karakteristik kegiatan usaha yang ada di Kab. Banyumas Sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil dengan nilai investasi s.d. 5 miliar rupiah, sehingga pengendalian atas realisasi investasi menjadi cukup berat

Solusi :

1. Menyediakan form kendala atas LKPM, menyampaikan informasi periode laporan LKPM, menyusun daftar perusahaan (short list) yang diprioritaskan.
2. Memberikan pemberitahuan status perbaikan melalui berbagai media komunikasi, koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terkait kendala system.

- 
- 
3. Mendorong percepatan ketersediaan kawasan industri dengan melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
 4. Melakukan kajian investasi yang berkualitas serta pemetaan lahan yang siap untuk investasi dengan ditopang oleh anggaran yang memadai.
 5. Melakukan upaya lebih keras inventarisasi data secara menyeluruh atas kegiatan usaha yang belum LKPM, untuk dilakukan strategy pengendalian atas realisasi investasi dan pelaporannya, serta melakukan upaya peningkatan iklim investasi dan berbagai fasilitas agar kegiatan usaha mikro kecil menengah terus berkembang menjadi usaha besar diantaranya dengan program UMKM naik kelas.

Pencapaian realisasi investasi ada Tahun 2022 terdiri dari dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada sector tersier (perdagangan dan jasa) dengan nilai investasi Rp 1.246.117.393.363,00 dari total investasi Rp 1.637.794.413.503,00 terdiri dari investasi LKPM non UMK sebesar Rp 859.956.000.000,00 LKPM UMK sebesar Rp 56.321.550.959,00 ditambah realisasi non LKPM sebesar Rp 710.064.129.072,00.

Sedangkan nilai Nilai capaian investasi LKPM dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.73

JUMLAH REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR TRIWULAN I-IV
TAHUN 2022

NO	SEKTOR	LKPM NON UMK		LKPM UMK	NON LKPM / MIKRO	JUMLAH
		PMA	PMDN	PMDN	PMDN	
1	Sektor Primer	Rp -	Rp 868.300.000	Rp 70.000.000	Rp 30.244.785.000	Rp 31.183.085.000
2	Sektor Sekunder	Rp 47.354.994	Rp 235.296.900.000	Rp 9.955.481.000	Rp 115.194.199.145	Rp 360.493.935.139
3	Sektor Tersier	Rp 11.405.378.477	Rp 623.790.800.000	Rp 46.296.069.959	Rp 564.625.144.927	Rp 1.246.117.393.363
JUMLAH TOTAL		Rp 11.452.733.472	Rp 859.956.000.000	Rp 56.321.550.959	Rp 710.064.129.072	Rp 1.637.794.413.503

Grafik 1
Investasi Per sektor



Grafik 2
Penyerapan Tenaga Kerja di Kab. Banyumas



Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Visi dan Misi DPMPSTP Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah Peningkatan Investasi daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banyumas dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah.

Dari 2 (dua) sasaran diwujudkan dengan program, capaian kinerja program sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL dengan Prosentase serapan anggaran 96,71 %, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ KotaPenyelesaian Aduan Perizinan
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL dengan prosentase serapan anggaran 84,57%, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODALdengan Prosentase serapan anggaran 91,07%, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dengan Prosentase serapan anggaran 91,78 terdiri dari 1 (satu) Kegiatan:
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dengan prosentas serapan anggaran 96,96% terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP Kab. Banyumas pada Tahun 2022 adalah :

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022
2. Menyumbang penghargaan tingkat nasional untuk Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan nilai 95,01 yang diwakili oleh 6 unit layanan public dan DPMPTSP menyumbang nilai tertinggi yakni 95,99.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 Perubahan, dan hal ini merupakan wujud dari keinginan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan dapat mencerminkan aparatur pemerintah yang *Clean Governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2022 untuk sasaran pertama Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pencapaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 98,12% dan sasaran kedua Meningkatnya Nilai Investasi Daerah pencapaian kinerjanya menunjukkan hasil sebesar 300,51%, sehingga rata-rata kinerja sasaran strategis 199,32%. Tingkat efisiensi sasaran satu adalah 4,41% dan sasaran dua adalah 208,73%, sehingga rata-rata tingkat efisiensi sasaran 106,57%.

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas termasuk

kriteria **”Sangat Tinggi”** dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja rata-rata sasaran strategis (IKU) menunjukkan hasil rata-rata 199,32%, capaian kinerja sasaran menunjukkan hasil rata-rata 984,21%, capaian kinerja program yang menunjukkan hasil rata-rata sebesar 99,10%, capaian kinerja kegiatan menunjukkan rata-rata sebesar 141,13%, capaian kinerja sub kegiatan menunjukkan rata-rata sebesar 194,33 % hasil capaian kinerja keuangannya sampai 30 Desember 2021 sebesar 97,01 %. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang telah mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta dukungan dana.

Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pasti terdapat kendala, kendala tersebut antara lain :

- a. Belum optimalnya iklim dan kemudahan dalam berinvestasi
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan umum di bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal,
- c. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas SDM.
- d. Kurangnya muatan dalam peta potensi investasi di Kab. Banyumas sehingga belum dapat menggambarkan secara detail dan komprehensif.
- e. Kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi, sehingga menjadi hambatan dalam pengambilan strategy ataupun keputusan yang mestinya dilakukan.

Dalam setiap kendala yang dihadapi terdapat sebuah langkah antisipatif atau solusi yang akan dilaksanakan, antara lain :

- a. Ditetapkan perbub terkait insentif penanaman modal.
- b. Peningkatan TI SIGAIB yaitu dengan penambahan menu serta peningkatan kuantitas dan kualitas penyajian.
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta PTSP bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait baik tingkat provinsi maupun pusat ataupun melalui In House Training (IHT).
- d. Dilakukan Kerjasama dengan pihak ketiga/akademisi untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut.
- e. Dilakukanya analisis data informasi serta perencanaan pengelolaan data lebih lanjut agar data dapat disajikan dan dimanfaatkan oleh organisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini disusun, kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 04 Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas

IRAWATI, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650126 199003 2 005



LAMPIRAN

Lampiran 1
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Perangda Dpmptsp (Kepala OPD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Ket
1.	Meningkatnya Proyek Investasi	Pertumbuhan proyek investasi daerah	1%	43,12%	4.313	Sasaran
2.	Menurunnya peraduan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan public	100%	100%	100	Sasaran
3.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai investasi daerah	545 m	1.637,79 m	300,51	Tujuan
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89,00	87,33	98,12	Tujuan
	PK Perubahan					
5.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan	100%	100%	100	Sasaran
6.	Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang berulang	0%	0%	100	Sasaran
7.	Meningkatnya kegiatan usaha yang berizin	Persentase kegiatan usaha yang berizin	10%	30,81%	308	Sasaran

Lampiran 2
Pengukuran Kinerja Tahun 2022

**Nama Jabatan Kabid Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian Kesra & Kabid Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan
Pada Perangkat Daerah Dpmptsp**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	90	100	111,11
2	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	5.000	33.705	674,10
3	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitasi / insentif	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitasi / insentif	-	-	-
4	Terlaksananya pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sektor perekonomian kesra dan pembangunan	Jumlah pemantauan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sektor perekonomian kesra dan pembangunan	35	105	300,00
5	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan aduan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan aduan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	250	737	294,8

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sektor perekonomian kesra dan pembangunan	5.050	34.027	673,80
7	Terwujudnya jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik	Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik	214	1.538	718,69

Lampiran 3
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Nama Jabatan Kabid PIPPM Pada Perangkat Daerah Dpmptsp

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	75	0	0
2	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan pemberian fasilitasi / insentif PM	3	0	0
3	Tersedianya dokumen pemberian fasiilitasi/ insentif dan kemudahan PM	Jumlah dokumen pemberian fasiilitasi/ insentif dan kemudahan PM	3	0	0
4	Terlaksananya evaluasi pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pemberian fasilitasi/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal	3	0	0
5	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PM	1	1	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Tersedianya dokumen RUPM K	Jumlah dokumen RUPM K	1	0	0
7	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	1	1	100
8	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Percentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	80	100	125
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi PM	3	3	100
10	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal	Jumlah strategi promosi penanaman modal	1	0	0
11	Terlaksananya kegiatan promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	3	3	100

Lampiran 4
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Nama Jabatan Kabid Daldatin Pada Perangkat Daerah Dpmptsp

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	88	117,71	133,76
2	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LKPM	4	4	100
3	Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan PM	12	6	50
4	Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan PM	7	70	1000
5	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan PM	12	112	933,33
6	Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	80	100	125
7	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	20.000	38.881	194,41

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8	Tersedianya data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi	Jumlah data yang disajikan, dimanfaatkan dan diinformasikan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi	2	9	450

Lampiran 5
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Nama Jabatan Sekretaris Pada Perangkat Daerah Dpmptsp

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97,01	97,01
2		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100
3		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100
4		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	3	3	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	2	100
7	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	1	100

Lampiran 6 DOKUMENTASI KEGIATAN

1. APEL PAGI DI KANTOR DPMPTSP



2. APEL PAGI DI MPP



3. BIMTEK/SOSIALISASI PENGAWASAN PERIZINAN DAN LKPM



4. KEGIATAN CAPACITY BUILDING



4. FOTO BERSAMA DI MENARA



5. FOTO BERSAMA PELATIHAN BKPM



6. FOTO BERSAMA DI HALAMAN



7. CJIBF 2



8. DPMPTSP BERBAGI/PEDULI



9. FASILITASI PERIZINAN PHRI



10. FGD FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK SADAR WISATA



11. FGD PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI JATENG



12. FGD POTENSI INVESTASI SEKTOR PERIKANAN



13. GELAS UMI KECE SUNDAY MORNING GOR SATRIA



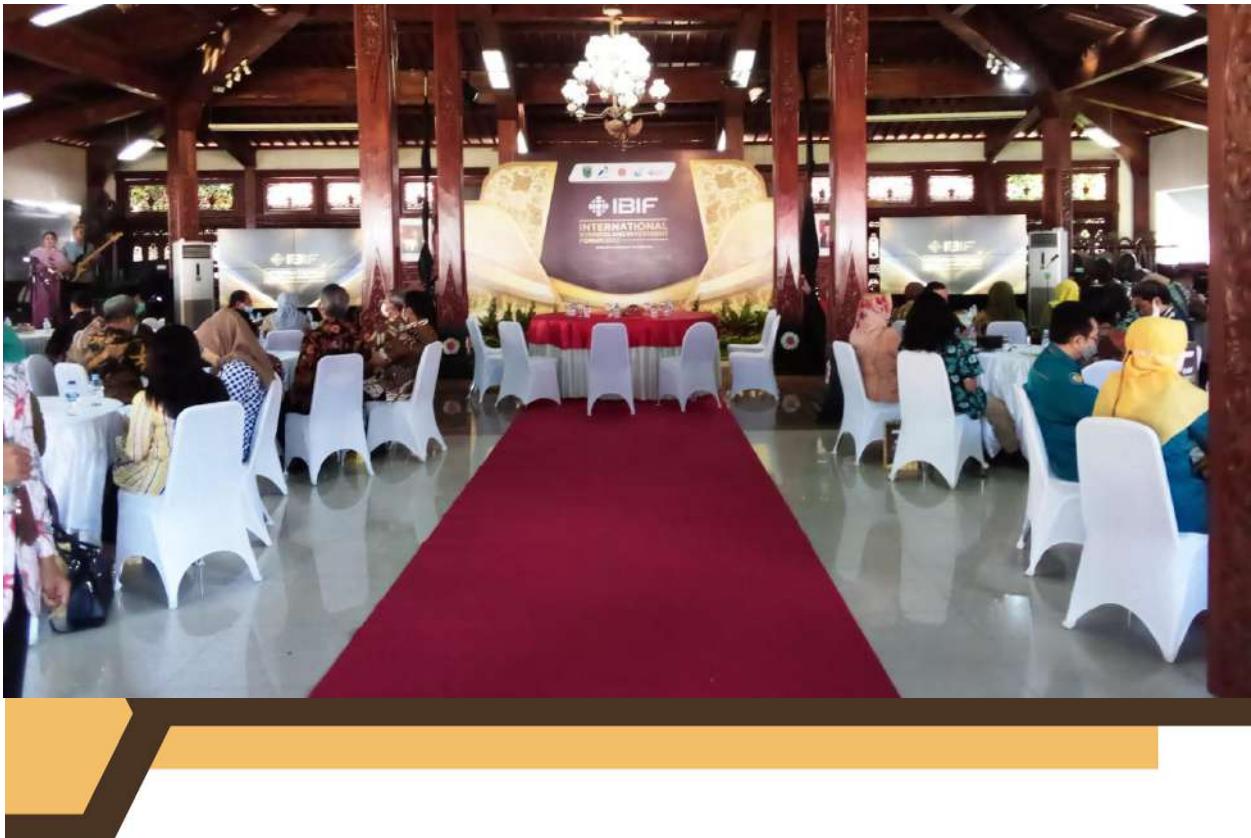
14. GELAS UMI KECE KEC BATURADEN



15. HUT MPP BERSAMA BUPATI



16. IBI



17. IHT



18. TOKOH KICK ANDY



19. KUNJA DARI KAB SEMARANG



20. KUNJUNGAN CENTRAL SOUTHEM CHINA ELECTRIC KE PLTMH LOGAWA



21. KUNJUNGAN OMBUDSMAN LAPORAN DAN TATAP MUKA



22. LAYANAN DRIVE THRU MPP



23. MONEV PELAYANAN PUBLIK KEMENPAN RB



24. MPP FEST LOMBA MEWARNAI





25. MPP FEST LOMBA BAND



26. KEGIATAN PELAYANAN DI MPP



27. MPP TAMPAK DEPAN (DEKAT)



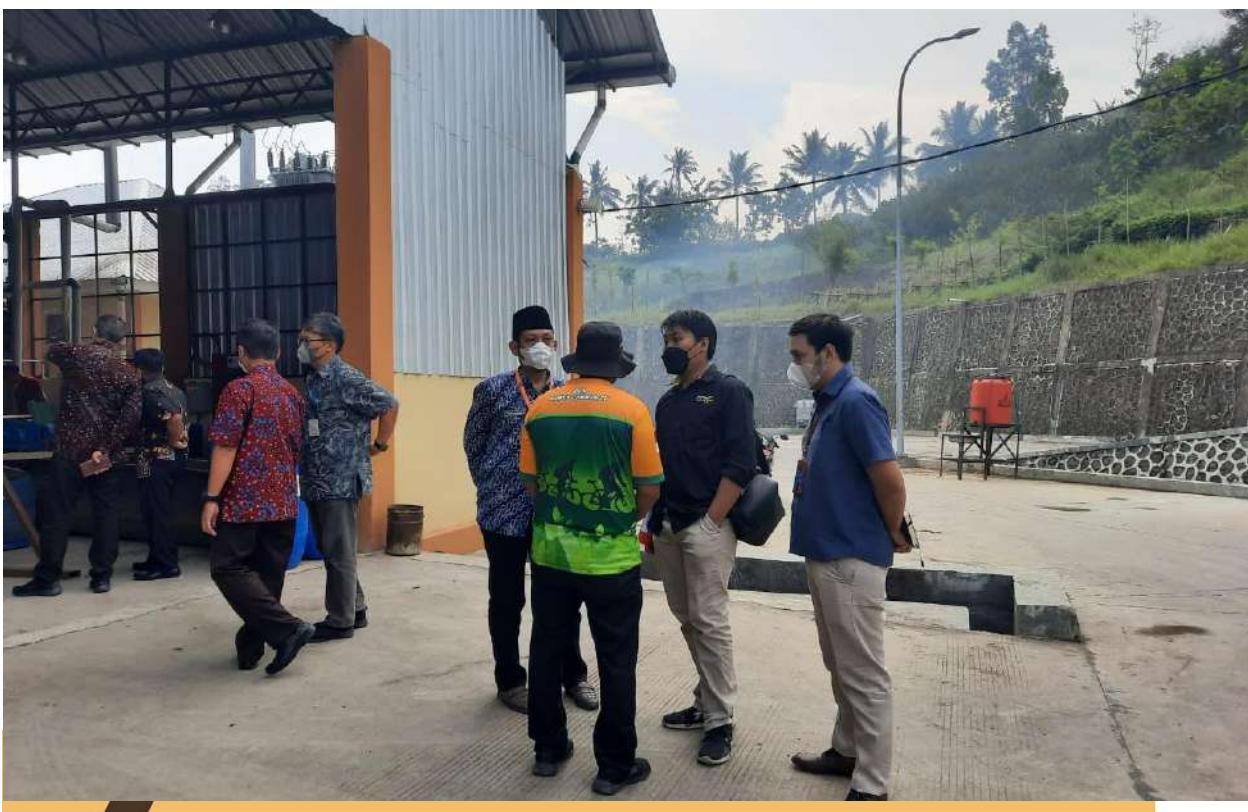
28. OPENING GERAI BAZNAS



29. BIMTEK/PELATIHAN PTSP TINGKAT DASAR



30. PENDAMPINGAN RENCANA INVESTASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA



31. PENERIMAAN KUNJA DARI KAB. CIAMIS



32. PENGAWASAN DI MORO MALL



33. PENGAWASAN PERIZINAN KAWASAN PENDIDIKAN TK SD UMP



34. PENGHARGAAN JUARA II PENILAIAN PTSP/PPB BKPM



35. PENGHARGAAN KARYAWAN TERBAIK



36. PENYELESAIAN ADUAN PT PANCAR JATILAWANG



37. RAPAT EVALUASI KINERJA TW III



38. RAPAT SKM



39. SIARAN RRI PRO 1 TEMA TREN PERTUMBUHAN INVESTASI



40. TINJAUAN LOKASI CAFE



41. TINJAUAN KE LOKASI APOTEK



42. TINJAUAN SMARTFISHERIES DESA PANEMBANGAN



43. VISITASI KE RS



44. Penghargaan Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022

